

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR
1 TAHUN 2007 PROGRAM PENDIDIKAN AL-QUR'AN PADA
SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN BENTENG
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

FIRMAN

NIM. 015881613

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2018

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM ini berjudul : Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Program Pendidikan Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber kutipan mapun rujukan telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Makassar, 20 Januari 2016

Yang menyatakan,

Firman
NIM 015881613

ABSTRAK**Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Pendidikan Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar****FIRMAN****Universitas Terbuka**

Penelitian dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Program Pendidikan Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan pada seluruh Sekolah Dasar di Kecamatan Benteng. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data akan dianalisis secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Sebagai kesimpulan, (1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Program Pendidikan Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. adalah 1). Unsur pelaksana tidak kompoten dibidangnya 2). Program pendidikan al-Qur'an adalah implementasi dari Perda Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pendidikan al-Qur'an. 3). Kelompok sasaran adalah seluruh umat Islam di Kabupaten kepulauan Selayar namun realitasnya hanya berlaku bagi sebagian murid/siswa SD/SMP/SMA/SMK. Implementasi pendidikan al-Qur'an dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu : 1). Komunikasi tidak bisa berjalan secara efektif, 2). Sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. 3). Sikap pelaksana, dalam pelaksanaan program pendidikan al-Qur'an tidak dilakukan oleh lembaga yang berkompotensi. 4). Struktur birokrasi, dalam mengimplementasikan pendidikan al-Qur'an adalah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan yang seharusnya adalah Dinas Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran quantum learning dan model guru asuh

Kata Kunci : Analisis Implementasi kebijakan dan Pendidikan Al-Qur'an.

ABSTRACT

Analysis Implementation of Regional Regulation No. 1 Year 2007 Education Qur'an At Elementary School in Sub district of Benteng, District of Selayar Island

FIRMAN

Universitas Terbuka

The research done to find the explanation of the Implementation of Regional Regulation No. 1 Year 2007 Program Qur'an At Elementary School in Sub district of Benteng, District of Selayar Island. It applied qualitative methodology. It was conducted at whole Elementarys in Sub district of Benteng. The data Source were primary and secondar. The data collection were depth interview and documentation technique. The data of the research was analyzed descriptively by reducing, presenting and conclusion.

As conclusions, the Implementation of Regional Regulation No. 1 Year 2007 Program Qur'an At Elementary School in Sub district of Benteng, District of Selayar Island are: (1). The implementer of the program was not competent in his/her educational background. (2). Al-Quran Education Program was the implementation of the local government regulation No. 1 2007 about Al-Quran Education. (3). The objects of the program were Muslims in District of Selayar Island but it was only implemented on some elementary students and senior high school. There were some factors influenced the program, namely: 1). The communication was not effectively run. 2). The lack of resources. 3). Attitude. The attitude of the Program Implementer did not match the duty and function. 4). Structure of bureaucracy. The program was handled by People Welfare (Kesra), whereas, it should be handled by National Education Ministry of District of Selayar Island.

Key Word: *The Analysis Implementation of Regional Regulation and Al-Quran Education.*

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2007 PROGRAM PENDIDIKAN AL-QUR'AN PADA SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN BENTENG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Penyusun TAPM : FIRMAN

NIM : 015881613

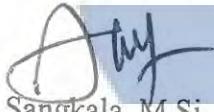
Program Studi : S2 MAPU

Hari/Tanggal : Sabtu/ 18 Februari 2017

Menyetujui

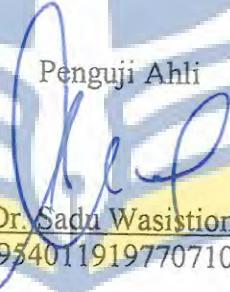
Pembimbing I,

Pembimbing II


Prof. Dr. Sangkala, M.Si
NIP.196311111991031002


Dr. Ir. Nurul Huda, MA.
NIP.196307291987032001

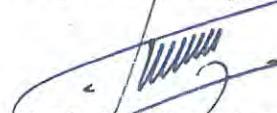
Pengaji Ahli


Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S
NIP. 195401191977071001

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Administrasi Publik


Dr. Darmanto, M. Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur
Program Pascasarjana


Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PENGESAHAN**

Nama : FIRMAN
NIM : 015881613
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Judul TAPM : ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2007 PROGRAM PENDIDIKAN AL-QUR'AN PADA SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN BENTENG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia penguji TAPM program pascasarjana, program studi administrasi publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu/18 Februari 2017

Waktu : 8.00 s/d 9.45 wita

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji :

Dr. Tita Rosita, M.Pd

Penguji Ahli :

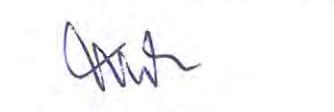
Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S

Pembimbing I :

Prof. Dr. Sangkala, M.Si

Pembimbing II :

Dr. Ir. Nurul Huda, MA.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM). TAPM ini berjudul : " Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Pendidikan Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar". Suatu penelitian pada Sekolah Dasar di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka (UPBJJ-UT Makassar).

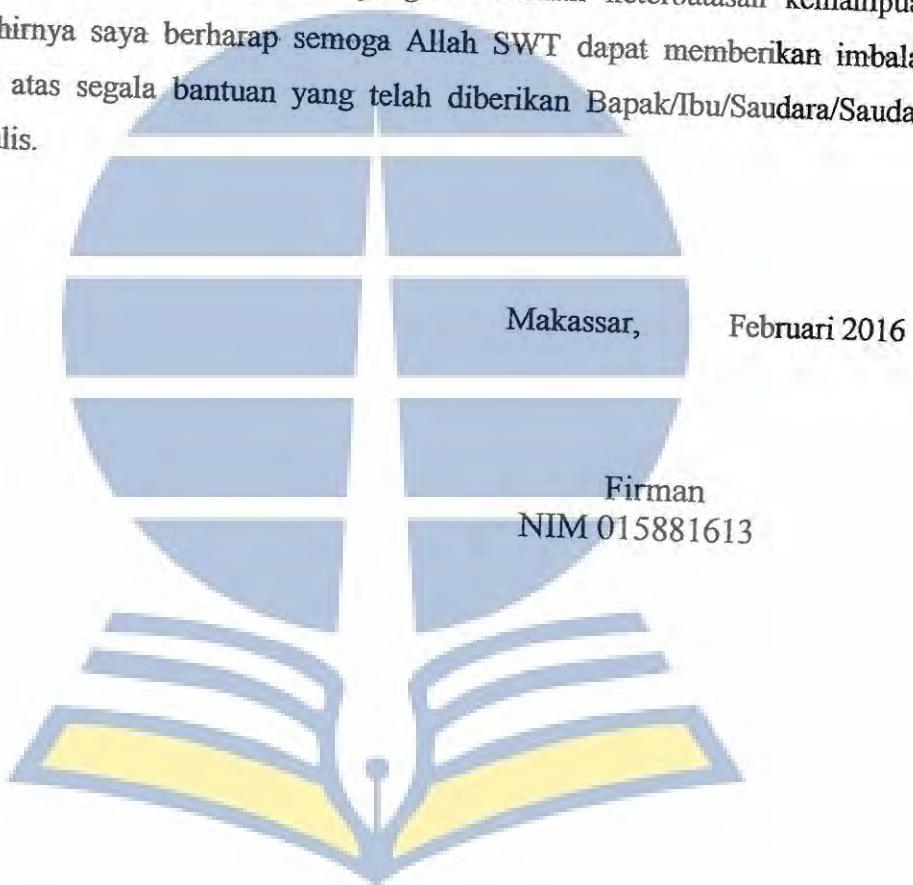
Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaika TAPM ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang langsung maupun yang tidak langsung memberi dukungan bantuan moril, kesempatan dan informasi yang membuat TAPM ini dapat diselesaikan.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Terbuka.
2. Suciati. M. Sc. Ph.D Selaku Direktur Program Pascasarjana.
3. Prof. Dr. Sangkala, M.Si. dan Dr. Ir. Nurul Huda, MA masing-masing selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan mengoreksi TAPM
4. Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik.
5. Andi Sylvana, SE., M.Si. Selaku ketua UPBJJ-UT Makassar
6. Bapak/ibu tutor Program studi Administrasi Publik Universitas Terbuka yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan bimbingan
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional beserta jajarannya yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya membantu peneliti saat melakukan penelitian.
8. Istri tercinta Sitti Nurmi dan anak-anak tersayang Nabilah Zahrani Nur dan Ilmiyah Zahrani Nur yang dengan penuh pengertian dan kesabaran mendukung telah penulis menjalani pendidikan.

9. Teman-teman kuliah Pascasarjana Program Studi Administrasi Publik angkatan 2012.1 yang telah banyak memberikan masukan, saran, dan dukungan selama mengikuti pendidikan.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu , yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyusunan TAPM ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan TAPM ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Akhirnya saya berharap semoga Allah SWT dapat memberikan imbalan yang sesuai atas segala bantuan yang telah diberikan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari kepada Penulis.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	6
B. Penelitian Terdahulu	6
C. Kerangka Pemikiran	43
	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Sumber Data	48
D. Instrumen Penelitian	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Metode Analisis Data	49
G. Definisi Operasional	51
	52
BAB IV TEMUAN DAN BAHASAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Benteng	53
1. Letak Geografis dan Keadaan Penduduk	53
B. Gambaran Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar	53
1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar	54
2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar	54
3. Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar	59
4. Rencana Program Dan Kegiatan Tahunan	60
C. Implementasi Perda No.1 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar	61
	64

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Perda No.1 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar	66
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	70
A. Simpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

No		Halaman
1.	Kerangka Pemikiran	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu pembentuk karakter dasar bagi generasinya ke depan. Tanpa peranan dunia pendidikan, maka kekayaan bangsa secara perlahan-lahan pudar dan bahkan hilang dari pergulatan kehidupan sebagai tatanan. Adanya akulturasi budaya antara negara satu dengan negara lain, memungkinkan terjadinya kecenderungan salah satu pihak untuk mendominasi, diantaranya adalah kurang pedulinya dunia pendidikan untuk menjadikan kebudayaan sebagai pokok pembahasan yang wajib disampaikan kepada anak-anak didik. Oleh karena pendidikan merupakan lembaga yang akan membentuk karakter paling mendasar, hendaklah dilandasi dengan dasar-dasar pendidikan agama yang kuat agar mampu menjadi basis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga nantinya dipastikan menuju arah penggunaan yang tepat dan berguna bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa dan salah satunya adalah memberikan kompetensi baca tulis Alqur'an sedini mungkin kepada anak-anak didik.

Penentuan pembuatan suatu kebijakan pada dasarnya memerlukan suatu pendekatan tertentu, maka model tahapan atau proses dalam pembuatan kebijakan diperlukan untuk memecahkan masalah. Prosesnya terdiri dari a) *Agenda of Goverment*: masalah yang ada di masyarakat menjadi agenda pemerintah, b) *Formulation and Legitimation of Goals and Program*: pengumpulan informasi, analisa dan penyebarluasan, c) *Program Implementation*: proses pencarian dan

penggerahan sumber daya untuk mewujudkan tercapainya tujuan yang ditetapkan, d) *Evaluation of Implementation Performance and Impacts*: menilai bagaimana implementasi kebijakan dan dampak yang ditimbulkan, e) *Decision Absent the Future of Policy and Program*: menentukan apakah program atau kebijakan tersebut dianjurkan dengan berbagai perbaikan atau dibatalkan (Van Muller dalam Solihin, 2001: 45).

Perhatian pemerintah terhadap masalah buta aksara baca tulis Alqur'an selalu diupayakan, terutama melalui Kementerian Agama yang menjadikan program "Pemberantasan Buta Huruf Alquran" sebagai salah satu program prioritas yang kemudian melahirkan surat keputusan bersama (SKB), yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 128 tahun 1982 dan nomor 44 A tahun 1982 tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis Alquran bagi umat Islam, dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengamalan Alquran dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertian mata pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Al-Quran adalah suatu studi yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang difokuskan pada proses dan pengetahuan tentang membaca dan menulis serta pemahaman tentang kandungan Al-Quran yang berguna untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kurikulum muatan lokal pada hakikatnya merupakan suatu perwujudan pasal 38 ayat 1 undang-undang system pendidikan nasional (UUSPN) yang berbunyi: Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan dan ciri khas satuan pendidikan.

Hakekat mata pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Al-Quran dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahun 2007 adalah awal diterbitkan perda pendidikan Al-Quran. Dengan diterbitkannya perda Nomor 1 tahun 2007 tentang pendidikan alqur'an Kabupaten Kepulauan Selayar, maka pendidikan Al-Quran dijadikan salah satu mata pelajaran muatan lokal di semua jenjang pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan Al-Quran adalah upaya sistematis untuk menumbuh-kembangkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Quran.

Maksud diadakannya Pendidikan Al-Quran sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islami yang beriman, cerdas, dan berakhhlak mulia. Sedangkan tujuan diselenggarakannya pendidikan Al-Quran adalah agar setiap peserta didik selain dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al-Quran secara baik dan benar juga fasih, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran.

Di Kabupaten Kepulauan Selayar, perhatian pemerintah daerah terhadap pemberantasan buta baca huruf alquran juga sangat serius dengan diterbitkannya perda Nomor 1 tahun 2007 tentang pendidikan alqur'an. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menindaklanjuti perda tersebut diantaranya dengan mengangkat 95 guru BTQ yang diangkat pada tahun 2007 yang disebar ke beberapa SD, SMP, dan SMA/SMK dengan maksud akan menurunkan tingkat buta baca huruf alquran. Tetapi cara ini masih belum secara signifikan menurunkan jumlah anak yang masih buta baca huruf alquran.

Setelah adanya implementasi perda Nomor 1 tahun 2007 kendala yang dihadapi oleh guru BTQ adalah kurangnya waktu jam pelajaran untuk Pendidikan alqur'an, hanya satu jam pelajaran. Hasil wawancara dari guru Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) pada SDN Benteng I, ibu Rosdiana, SE. Kendala lain yang diungkapkan oleh informan yaitu: tidak adanya kurikulum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar. Tidak seimbang antara pengajar dengan jumlah siswa, 95 guru BTQ yang diangkat sejak pada tahun 2007 berbanding dengan ribuan siswa dari bersemua jenjang pendidikan. Dan juga tidak ada keseragaman materi pada seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hasil Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar, bahwa Perda Nomor 1 tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Qur'an belumlah ada Surat Keputusan Bupati sebagai dasar operasionalnya. Surat Keputusan Bupati berfungsi menjelaskan hal-hal teknis yang ada dalam perda. Alhasil, tanpa Surat Keputusan Bupati, perda dinilai sekadar produk hukum.

Berbagai usaha sebenarnya dapat dilakukan untuk mengimplementasikan perda Nomor 1 tahun 2007 diantaranya dengan memasukkan pendidikan baca tulis alquran sebagai kurikulum pada anak sekolah maupun madrasah. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menyatakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) selain beberapa mata pelajaran yang wajib disampaikan, juga secara implisit pentingnya mata pelajaran Muatan Lokal wajib diberikan pada semua tingkat satuan pendidikan. Kurikulum yang berbasis muatan lokal ini untuk proses kelanjutannya sangat bergantung dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan daerah itu sendiri, yang jelas bagaimana formulasi kurikulum muatan lokal mampu

menjadikan karakteristik suatu daerah tetap menjadi pertimbangan penting untuk mengembangkannya melalui dunia pendidikan.

Implementasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus, banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya implementasi kebijakan tidak selalu berada pada tempat yang vakum, sehingga terdapat berbagai macam faktor disekelilingnya yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan.

Dalam model kebijakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik dan sikap aparat pelaksana (Van Meter dan Van Horn, 1976).

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: "Implementasi Perda No.1 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka masalah pokok yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah Implementasi Perda No.1 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: untuk memperoleh penjelasan mengenai Implementasi Perda No.1 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah untuk :

1. Dari hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai tambahan atau masukan sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi Sekolah Dasar di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan Pendidikan Al-Qur'an yang perlu diupayakan lebih baik.
2. Memberikan informasi dan bahan pertimbangan kepada Pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Kepulauan Selayar tentang sejauh mana Implementasi Perda No.1 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar, khususnya di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Memberikan informasi kepada sekolah Dasar di Kabupaten Kepulauan Selayar tentang pentingnya Pendidikan Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Penentuan pembuatan suatu kebijakan pada dasarnya memerlukan suatu pendekatan tertentu, maka model tahapan atau proses dalam pembuatan kebijakan diperlukan untuk memecahkan masalah. Prosesnya terdiri dari a) *Agenda of Goverment*: masalah yang ada di masyarakat menjadi agenda pemerintah, b) *Formulation and Legitimation of Goals and Program*: pengumpulan informasi, analisa dan penyebarluasan, c) *Program Implementation*: proses pencarian dan penggerahan sumber daya untuk mewujudkan tercapainya tujuan yang ditetapkan, d) *Evaluation of Implementation Performance and Impacts*: menilai bagaimana implementasi kebijakan dan dampak yang ditimbulkan, e) *Decision Absent the Future of Policy and Program*: menentukan apakah program atau kebijakan tersebut dianjurkan dengan berbagai perbaikan atau dibatalkan (Van Muller dalam Solihin, 2001: 45).

Menurut Fadillah (2001: 12), implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-

individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.

Menurut Sobana (2005: 2) implementasi kebijakan merupakan suatu sistem pengendalian untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa implementasi pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakan namun juga melingkupi tindakan-tindakan atau perilaku individu-individu dan kelompok pemerintah dan swasta, serta badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dalam mencapai tujuan, akan tetapi juga mencermati berbagai kekuatan politik, sosial, ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai. Dengan demikian, implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, tetapi mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut.

b. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yang disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process* atau model proses implementasi kebijaksanaan (Solichin Abdul Wahab, 2005:78).

Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjaku dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijaksanaan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijaksanaan dengan prestasi kerja atau *performance* (Solichin Abdul Wahab, 2005: 78).

Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa *perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak* merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi? Seberapa jauhkah tingkat efektifitas mekanisme-mekanisme control pada setiap jenjang struktur? (masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan). Seberapa pentingkah rasa keterikatan masing-masing orang dalam organisasi? (hal ini menyangkut masalah kepatuhan).

Berdasarkan hal di atas maka Van meter dan Van Horn kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijaksanaan menurut:

- 1) Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dan,
- 2) Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. (Solichin Abdul Wahab, 2005:79).

Alasan dikemukakannya hal ini ialah proses implementasi itu akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijaksanaan semacam itu, dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relative sedikit,

sementara kemungkinan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi.

Hal lain yang dikemukakan oleh kedua ahli diatas ialah bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan. Variabel-varibel bebas itu ialah:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijaksanaan
- 2) Sumber-sumber kebijaksanaan
- 3) Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana.
- 4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
- 5) Sikap para pelaksana
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Variabel-varibel kebijaksanaan bersangkutan paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi baik organisasi formal serta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antar hubungan di dalam sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoprasionalkan program di lapangan.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Edward dalam Fadillah (2001: 14-15), ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut bekerja secara simultan dan berinteraksi antara satu dan yang lainnya, untuk membantu bahkan menghambat implementasi kebijakan. Keempat faktor yang dimaksud tersebut adalah:

1) Komunikasi

Persyaratan bagi implementasi yang efektif adalah mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, untuk itu sangat diperlukan komunikasi yang baik dan lancar, komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

2) Sumber daya

Sumber daya memegang peranan yang penting dikarenakan apabila dari pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijaksanaan maka implementasi mungkin berjalan tidak efektif. Sumber daya yang dimaksud disini adalah staf yang mempunyai *skill* memadai untuk melaksanakan tugas-tugasnya, informasi mengenai pelaksanaan, kebijakan atau data-data yang akurat dan wewenang serta fasilitas yang diperlukan.

3) Sikap pelaksana dan kecenderungan pelaksana

Apabila pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, kemungkinan besar mereka melaksanakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat keputusan. Begitu juga berlaku sebaliknya apabila terjadi hal yang berlawanan. Dengan demikian kecenderungan-kecenderungan pelaksana biasanya menimbulkan pengaruh terhadap kelancaran implementasi, baik yang mendukung maupun yang menghambatnya.

4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting terhadap pelaksanaan kebijakan dapat dimungkinkan dihambat oleh struktur birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit-belit, serta prosedural yang tidak efisien. Implementasi kebijakan publik banyak ditentukan oleh aparat pelaksana dalam birokrasi dan prosedur implementasi atau karakteristik para pejabat birokrasi. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik sesungguhnya juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar birokrasi, seperti faktor sosiologis, budaya atau kultur masyarakat.

2. Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Menurut Poerwadarminta (2000: 16), kebijakan dapat diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Istilah kebijakan muncul dalam konteks yang berlainan, sehingga menimbulkan keragaman penggunaan istilah tersebut.

Menurut Hasibuan (2001: 64), kebijakan adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-umsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan mengambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan perencanaan manajemen yang baik, maka perusahaan dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang

akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi.

Sementara itu Mustopawijaya (2004: 16-17), merumuskan kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi, baik publik atau bisnis, yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu berisikan ketentuan-ketentuan yang berisikan pedoman perilaku dalam:

- 1) Pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan
- 2) Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan, baik dalam hubungan dengan unit organisasi atau pelaksana maupun kelompok sasaran dimaksud.

b. Kategorisasi Kebijakan

Istilah kebijakan dewasa ini telah digunakan untuk menjelaskan hal yang beragam. Menurut Wahab (2001: 22), penggunaan istilah kebijakan dapat dikategorikan dalam sepuluh kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kebijakan sebagai label bagi suatu bidang kegiatan tertentu
Dalam konteks ini, kata kebijakan digunakan untuk menjelaskan bidang kegiatan pemerintahan atau bidang kegiatan di mana pemerintah terlibat di dalamnya, seperti kebijakan ekonomi atau kebijakan luar negeri
- 2) Kebijakan sebagai ekspresi mengenai tujuan umum/keadaan yang dikehendaki
Di sini kebijakan digunakan untuk menyatakan kehendak dan kondisi yang dituju, seperti pernyataan tentang tujuan pembangunan di bidang SDM untuk mewujudkan aparatur yang bersih.

3) Kebijakan sebagai bidang proposal tertentu

Dalam konteks ini, kebijakan lebih berupa proposal, seperti misalnya usulan RUU di Bidang Keamanan dan Pertahanan atau RRU di Bidang Kepegawaian.

4) Kebijakan sebagai sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah Sebagai contoh adalah keputusan untuk melakakukan perombakan terhadap suatu sistem administrasi negara

5) Kebijakan sebagai sebuah pengesahan formal

Di sini kebijakan tidak lagi dianggap sebagai usulan, namun telah sebagai keputusan yang sah. Sebagai contohnya adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan keputusan sah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

6) Kebijakan sebagai sebuah program

Yang dimaksud dengan kebijakan di sini adalah program yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh adalah peningkatan pendaya gunaan aparatur Negara, yang menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, termasuk cara pengorganisasianya.

7) Kebijakan sebagai *out put* atau apa yang ingin dihasilkan

Yang dimaksud dengan kebijakan di sini adalah *out put* yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan, seperti misalnya pelayanan yang murah dan cepat atau pegawai negeri sipil yang profesional.

8) Kebijakan sebagai *out come*

Kebijakan di sini digunakan untuk menyatakan dampak yang diharapkan dari suatu kegiatan, seperti misalnya pemerintahan yang efektif dan efisien.

9) Kebijakan sebagai teori atau model

Kebijakan di sini menggambarkan model atau suatu keadaan, dengan asumsi yang digunakan. Sebagai contoh, kalau pajak di naikkan $x\%$ maka *revenue* diperkirakan akan naik $y\%$ atau kalau x dilakukan maka yang terjadi adalah y

10) Kebijakan sebagai proses atau tahapan yang perlu dilaksanakan

Kebijakan di sini menggambarkan suatu proses atau tahapan yang akan dilalui untuk mencapai hasil yang diharapkan.

c. Ciri-Ciri Kebijakan

Menurut Azwar (2000: 23-24), kebijakan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan langkah-langkah secara logis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada masa mendatang dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan menggunakan sumber daya yang tersedia. Kebijakan yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1) Bagian dari sistem administrasi

Kebijakan adalah bagian dari fungsi administrasi yang sangat penting, sehingga kebijakan harus ditempatkan dalam kerangka administrasi, artinya kebijakan dibuat harus dilaksanakan dan dievaluasi.

2) Dilaksanakan secara berkesinambungan.

Kebijakan merupakan bagian dari siklus pemecahan masalah (*problem solving cycle*) yang juga merupakan fungsi manajemen. Kebijakan akan kembali pada kebijakan berikutnya setelah langkah-langkah dalam siklus dilalui. Namun siklus tersebut bukan bersifat statis namun dinamis, sehingga akan berbentuk suatu spiral siklus yang tidak mengenal titik akhir.

3) Berorientasi pada masa depan

Hasil kebijakan menghasilkan kebaikan bukan saja saat ini tapi juga pada masa yang akan datang.

4) Mampu menyelesaikan masalah

Siklus kebijakan adalah siklus pemecahan masalah artinya penyusunan kebijakan didasarkan pada masalah yang dihadapi dan penyusunannya harus berdasarkan pada langkah-langkah siklus pemecahan masalah.

5) Mempunyai tujuan

Tujuan harus ditetapkan berdasarkan pada tujuan yang paling umum atau tujuan yang lebih berorientasi dampak (*impact*) dan hasil (*out put*) serta perlu dijabarkan kepada tujuan yang khusus atau yang berorientasi pada *out put* atau uraian yang lebih spesifik.

6) Bersifat mampu kelola

Kebijakan harus bersifat realistik, logis, objektif, runtut, fleksibel yang disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia.

d. Proses Pembuatan Kebijakan

Menurut Wibawa (2002: 5), proses pembuatan kebijakan mensyaratkan pengetahuan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil. Pengetahuan tersebut harus dimiliki oleh aktor-aktor kebijakan atau pembuat kebijakan. Dalam membuat kebijakan, para pembuat kebijakan harus memahami atau memiliki pengetahuan sebagai berikut:

- 1) Preferensi nilai-nilai masyarakat dan kecenderungannya
- 2) Pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif kebijakan yang tersedia

- 3) Konsekuensi-konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan
- 4) Rasio yang dicapai bagi setiap nilai sosial yang dikorbankan pada setiap alternatif kebijakan
- 5) Memilih kebijakan yang paling efisien

Selanjutnya tahapan proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyiapan agenda, yang merupakan tahap untuk menetapkan issue mana saja yang akan direspon oleh pemerintah.
- 2) Formulasi alternatif, yang merupakan tahap untuk menentukan tujuan serta berbagai alternatif untuk mencapai tujuan.
- 3) Penetapan kebijakan, yang merupakan tahap untuk menentukan alternatif atau pilihan mana yang akan dilaksanakan.
- 4) Pelaksanaan kebijakan, yang merupakan tahap untuk melaksanakan pilihan yang diambil.
- 5) Tahap evaluasi, yang merupakan tahap untuk menilai sejauh mana upayaupaya yang dilakukan sesuai dengan tujuan semula.
- 6) Penyempurnaan kebijakan, yaitu dengan mengoreksi pelaksanaan kebijakan
- 7) Terminasi, merupakan tahap akhir untuk mengakhiri kebijakan, baik karena tujuan yang sudah dicapai maupun yang disebabkan oleh kebijakan tersebut yang dirasakan tidak diperlukan lagi.

3. Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.

Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten / Kota”.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi / Kabupaten / Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.⁶

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati / Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati / Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati / Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan.

Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda.

Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Tata Ruang Wilayah Daerah
- 4) APBD

5) Rencana Program Jangka Menengah Daerah

6) Perangkat Daerah

7) Pemerintahan Desa

8) Pengaturan umum lainnya

4. Kajian tentang kurikulum

Kata "kurikulum" berasal dari bahasa Yunani yang semula digunakan dalam bidang olahraga, yaitu *currere* yang berarti jarak tempuh lari, yaitu jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start hingga finish. Pengertian ini kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan. Dalam bahasa Arab, istilah "kurikulum" diartikan dengan *manhaj*, yaitu jalan yang terang, atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik/guru dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai-nilai.

Pada dasarnya kurikulum memiliki tiga dimensi pengertian, yaitu:

- a. Kurikulum sebagai mata pelajaran, merupakan pandangan yang dianggap tradisional, dalam konsep kurikulum sebagai mata pelajaran ini biasanya erat kaitannya dengan usaha untuk memperoleh ijazah.

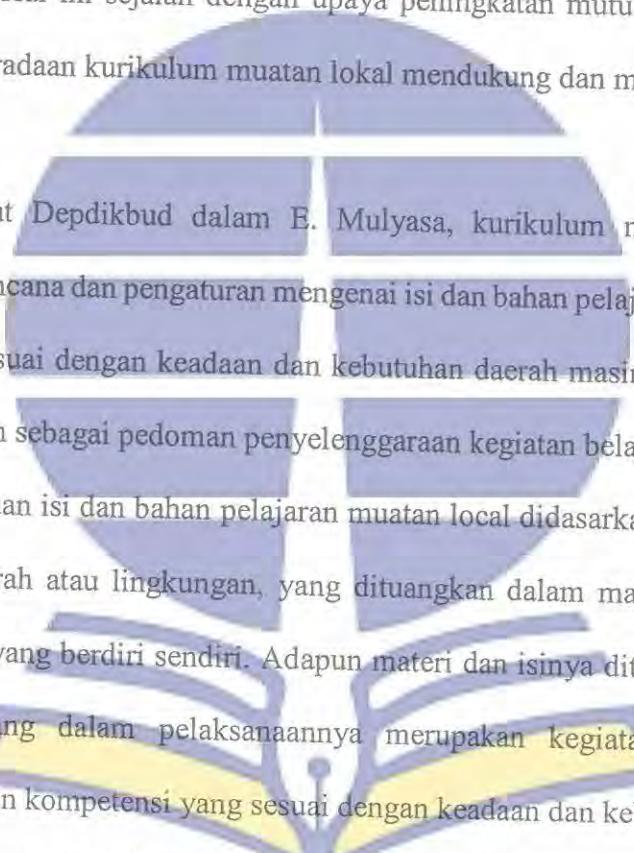
- b. Kurikulum sebagai pengalaman belajar yaitu bahwa pencapaian target pelaksanaan suatu kurikulum tidak hanya diukur dari kemampuan siswa menguasai seluruh Isi atau materi pelajaran seperti yang tergambar dari hasil tes sebagai produk belajar, akan tetapi juga harus dilihat proses atau kegiatan siswa sebagai pengalaman belajar
- c. Kurikulum sebagai perencanaan program pembelajaran, seperti yang dikemukakan oleh Hilda Taba diikuti oleh tokoh-tokoh yang lainnya, menyatakan bahwa kurikulum adalah perencanaan yang berisi tentang petunjuk belajar serta hasil yang diharapkan. Hal ini juga sejalan dengan rumusan kurikulum menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dikatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

Dan pengertian kurikulum diatas dapat dilihat bahwa setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda dalam mengartikan kurikulum. Namun dalam study tentang kurikulum yang telah dilakukan oleh banyak ahli menunjukkan bahwa pengertian kurikulum dapat ditinjau dari dua segi yang berbeda. Yaitu tinjauan menurut pandangan lama dan tinjauan menurut pandangan baru.

5. Konsep kurikulum muatan lokal

Muatan lokal diartikan sebagai program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan pembangunan daerah yang perlu diajarkan kepada siswa.

Muatan lokal merupakan bagian dan struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada standar isi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Keberadaan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terpusat, sebagai upaya agar menyelenggarakan pendidikan dimasing-masing daerah lebih meningkatkan relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional sehingga keberadaan kurikulum muatan lokal mendukung dan melengkapi kurikulum nasional.



Menurut Depdikbud dalam E. Mulyasa, kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

Penentuan isi dan bahan pelajaran muatan local didasarkan pada keadaan dan kebutuhan daerah atau lingkungan, yang dituangkan dalam mata pelajaran dengan alokasi waktu yang berdiri sendiri. Adapun materi dan isinya ditentukan oleh satuan pendidikan, yang dalam pelaksanaannya merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah.

Perlu dijelaskan disini keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial dan ekonomi, serta lingkungan budaya. Sedangkan kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat disuatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat sesuai dengan arah perkembangan serta potensi daerah yang bersangkutan.

Mengingat kurikulum muatan local merupakan bagian dari kurikulum nasional, maka masuknya muatan lokal tidak berarti mengubah kurikulum yang sudah ada. Artinya, ditinjau dan bidang studi yang telah ada dalam kurikulum nasional, tetap digunakan dan dijadikan rujukan dalam memasukkan bahan pengajaran muatan local. Dengan demikian sifat dari muatan local adalah memperkaya dan mempertajam pokok bahasan, yang telah ada dalam berbagai bidang studi dengan kepentingan dan bahan yang ada disekitarnya berdasarkan lingkungan alam, lingkungan sosial dan ekonomi, serta lingkungan budaya masyarakat setempat. Oleh sebab itu, isi program pendidikan muatan local berupa bahan-bahan pengajaran dari masyarakat setempat, bias pula media dan strategi pengajaran yang diangkat dan dikaitkan dengan lingkungan masyarakat disekitarnya.

Dari deskripsi diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan kurikulum muatan local harus benar-benar memperhatikan karakteristik lingkungan dan juga kebutuhan daerah dimana lembaga satuan pendidikan itu berada.

Secara umum muatan local bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap hidup kepada peserta didik agar memiliki wawasan yang mantab tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan nilai yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional.

Secara khusus pengajaran muatan lokal bertujuan agar peserta didik:

- a. Mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, social, dan budayanya,
- b. Memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai

daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya,

- c. Memiliki sikap dan prilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Muatan lokal merupakan gagasan-gagasan seseorang tentang kurikulum yang antara lain memuat pandangannya terhadap suatu pendidikan, tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Suatu gagasan pada dasarnya harus memiliki landasan-landasan tertentu agar dapat dibina dan dikembangkan sesuai dengan harapan dan pencetusnya.

Adapun landasan-landasan tersebut adalah:

a. Landasan Ideal

Mengingat muatan lokal merupakan bagian dari kurikulum, maka muatan local juga harus dikembangkan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan nasional pada khususnya. Disamping itu muatan local juga perlu dikembangkan berdasarkan UU RI No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional dan peraturan pemerintah Indonesia sebagai akibatnya.

b. Landasan Hukum

Sesuai dengan umtan terbitnya maka landasan hukum tentang muatan local adalah sebagai berikut;

- 1) Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No. 0412/U/1987 tanggal 11

Juli 1987 tentang penerapan muatan local kurikulum sekolah dasar.

- 2) Keputusan Direktur jendral pendidikan Dasar dan Menengah No. 173/C/Kep/M/1987 tanggal 7 Oktober 1987 tentang petunjuk pelaksanaan penerapan muatan local kurikulum sekolah dasar.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 31 ayat 1, pasal 37, pasal 38 ayat 1 dan pasal 39 ayat 1.
- 4) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar pasal 14 ayat 3 dan 4 dan pasal 37. c. Landasan Teoritik

d. Landasan teoritik muatan local untuk sekolah dasar sebagai berikut.

- 1) Tingkat kemampuan berpikir murid sekolah dasar mengharuskan kita menyajikan bahan kajian yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat kongkrit sampai tingkat abstrak, pengembangan kemampuan berpikir ini ditunjang antara lain teori belajar dari Ausubel dan konsep asimilasi dan Jean Peaget yang pada intinya menyatakan bahwa sesuatu yang barn haruslah dipelajari berdasarkan apa yang telah dimiliki siswa. Penerimaan gagasan barn dengan bantuan gagasan barn dengan bantuan pengetahuan yang telah ada ini sebenarnya telah dikemukakan oleh Fiedrich Herbart yang dikenal dengan istilah apersepsi.
- 2) Pada dasarnya anak-anak usia sekolah dasar memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar tentang segala sesuatu yang terjadi dilingkungan sekitarnya. Karena itu mereka selalu akan gembira bila dilibatkan secara mental, fisik dan sosialnya dalam mempelajari sesuatu. Mereka akan senang bila diberi kesempatan untuk menjelajahi lingkungan sekitarnya yang penuh dengan

sumber belajar.

e. Landasan Demografik

Keindahan bangsa dan Negara Indonesia terletak pada keaneka ragaman pada pola kehidupan dari beratus-ratus suku bangsa yang tersebar diberibu pulau dan sabang sampai merauke. Kekaguman terhadap bangsa dan Negara Indonesia telah dinyatakan oleh hampir seluruh bangsa didunia, karena keanekaragaman tersebut dapat dipersatukan oleh falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Keanekaragaman tersebut bukan saja ada pada bidang budayanya saja, melainkan juga pada keadaan alam, serta kehidupan sosialnya. Semuanya itu merupakan dasar yang sangat penting dalam mengembangkan muatan lokal.

Wujud dan kurikulum muatan lokal tidaklah hanya berbentuk mata pelajaran tambahan saja, melainkan juga dalam wujud yang lain. Adapun isi kurikulum muatan lokal yaitu:

- b. Memperkenalkan dan membiasakan melaksanakan norma-norma daerah setempat memakai alat peraga, alat-alat belajar, atau media pendidikan yang ada di daerah tersebut.
- c. Mengambil contoh-contoh pelajaran yang ada atau sesuai dengan keadaan dan kegiatan diwilayah tersebut.
- d. Memperkenalkan teori-teori yang cocok dengan kebutuhan atau kegiatan diwilayah tersebut.
- e. Peserta didik diberi kesempatan berpartisipasi dan berproduksi pada usaha-usaha didaerah tersebut.
- f. Keterampilan anak-anak yang dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan

tenaga kerja daerah tersebut.

- g. Anak-anak diikutsertakan dalam memecahkan masalah masyarakat setempat.
- h. Bidang study barn yang cocok dengan kebutuhan daerah tersebut

6. Kajian tentang pembelajaran baca tulis Al-Qur'an

Pembelajaran berasal dari kata "belajar" yang mendapat awalan pe akhiran an. Keduanya (pe-an) termasuk konfiks nominal yang bertalian dengan perfiks verbal "me" yang mempunyai arti proses.

Pembelajaran merupakan upaya untuk membelajarkan siswa melalui kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan berdasarkan kondisi yang ada.

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan baca atau membaca berarti melihat serta memaham isi dan apa yang ditulis, baik dengan mengucapkan dengan lisan atau cukup dalam hati.³⁰ Dan dalam pengertiannya membaca banyak sekali ragamnya, di antaranya membaca adalah sebagai proses melisankan paparan tulis. Ada juga yang mengartikan membaca sebagai proses pemberian makna pada simbol-simbol visual. Pengertian lainnya membaca adalah penerapan seperangkat keterampilan kognitif untuk memperoleh pemahaman dan tulisan yang dibaca. Adapula pengertian yang menyatakan suatu proses pemikiran dan penalaran pembaca terhadap bacaannya.

Sementara tulis atau menulis mengandung pengertian membuat huruf, angka, dan sebagainya dengan pena, pensil atau kapur.³¹ Berdasarkan pengertiannya menulis di bedakan menjadi beberapa macam yaitu: Pertama, Menulis sebagai suatu keterampilan mempunyai tiga teori yaitu selektif, pragmatif, dan fungsional. Selektif artinya materi yang dibatasi pada apa yang dibutuhkan oleh siswa untuk melatih

menulis, pragmatif artinya teori hendaknya dibenarkan. Sedangkan fungsional artinya teori yang dibenarkan hendaknya yang digunakan atau diperlukan siswa. Kedua, menulis sebagai suatu proses artinya menulis tidak dapat dibinakan secara selektif, tetapi setahap demi setahap. Ketiga, menulis sebagai kegiatan berfikir adalah dengan memilih dan menentukan tujuan/masalah sampai dengan pengembangan karangan secara utuh.

Sedangkan pengertian Al-Qur'an adalah kalamullah (finnan Allah), sebagai mu'jizat yang diturukan kepada nabi terakhir dengan perantara malaikat Jibril, yang ditulis di mushaf-mushaf, yang di nukilkan (di pindahkan kepada kita) dengan secara teratur, yang membacanya termasuk ibadah, yang susunannya dimulai dengan surat Al-Fatiha dan diakhiri dengan surat An-Nas. Definisi ini telah disepakati oleh para Ulama dan para ahli Ushul, yang telah menyepakati bahwa Al-Qur'an ini telah diturunkan oleh Allah SWT untuk menjadi konstitusi bagi umat, sebagai petunjuk bagi seluruh makhluk, untuk menjadi bukti atas kebenaran Rasulullah SAW, untuk menjadi saksi bahwa ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji, bahkan sebagai mu'jizat yang abadi yang menantang semua generasi dan ummat sepanjang masa.

Dan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran baca tulis Al-Qur'an merupakan suatu kegiatan membelajarkan siswa atau peserta didik untuk melihat serta memahami (baik dengan lisan maupun dalam hati) bentuk huruf atau tulisan atau bacaan di dalam Al-Qur'an.

Atau sebagai upaya membelajarkan peserta didik dalam membaca dan menulis Al-Qur'an secara teoritis dan praktis untuk memberikan motivasi, bimbingan,

pemahaman, kemampuan dan penghayatan terhadap isi yang terkandung dalam Al-Qur'an sehingga dapat diwujudkan dalam prilaku sehari-hari sebagai manifestasi iman dan taqwa kepada Allah SWT.

Adapun prinsip dilaksanakannya pembelajaran baca tulis Al-Qur'an sebagai muatan lokal adalah sebagai berikut:

a. Apersepsi

Maksudnya guru memberikan rangsangan perhatian dan kesadaran kepada anak didik agar dapat memperhatikan pelajaran yang akan diberikan secara sungguh-sungguh tidak main-main

b. Motivasi

Maksudnya adalah membangkitkan motivasi anak didik agar mau belajar sungguh-sungguh baik dari dalam maupun dari luar.

c. Perhatian

Maksudnya pengertian segala tenaga dan jiwa dengan penuh konsentrasi yang tertuju kepada semua obyek.

d. Individualitas

Maksudnya guru dalam mengajar harus memperhatikan sifat pembawaan dan kemampuan masing-masing individu anak didik, karena masing-masing anak didik di samping memiliki sifat-sifat kesamaan, namun juga memiliki banyak perbedaan berupa pembawaan dan kemampuan.

Tujuan dilaksanakan pembelajaran baca tulis Al-Qur'an sebagai muatan lokal oleh pemerintah adalah:

a. Tujuan umum: Untuk mewujudkan penghayatan dan pengalaman dalam

masyarakat muslim yang didasari nilai-nilai pancasila.

b. Tujuan khusus:

- 1) Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an.
- 2) Untuk menumbuhkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam masyarakat.

Jadi tujuan dengan adanya kurikulum muatan lokal baca tulis Al-Qur'an untuk memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, menulis, membiasakan dan menggemari Al-Qur'an serta

7. Kurikulum muatan lokal pembelajaran baca tulis Al-Qur'an

Istilah materi digunakan untuk sejumlah disiplin ilmu yang mengembangkan basis kegiatan sekolah, dan biasanya diklasifikasi dalam beberapa subyek materi yang berbeda-beda.⁵¹ Dalam hal ini materi kurikulum hanya sebagai alat, jadi isi atau materi kurikulum pendidikan harus didesain sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan demikian ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh guru dalam mengembangkan kurikulum yaitu menyajikan materi kepada peserta didik, antara lain:

- a. Materi yang dipilih berupa materi yang esensial.
- b. Meskipun terdapat materi yang diulang-ulang penyajiannya tetapi jelas berbeda keluasan dan kedalamannya.
- c. Didalam materi yang sudah diuraikan terdapat unsur-unsur baru yang dimasukkan dalam uraian itu sesuai dengan pembangunan yang sedang digalakkan seperti kependudukan, lingkungan hidup, keluarga berencana, transmigrasi, koperasi, dan sebagainya.

- d. Pendidikan diusahakan berorientasi kepada lingkungan atau daerah, yaitu dengan melaksanakan kurikulum muatan lokal.

Setiap mata pelajaran yang akan diajarkan telah tercantum materi-materi yang harus diberikan kepada siswa. Adapun ruang lingkup materi pembelajaran baca tulis Al-Qur'an meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Membaca Al-Qur'an dengan makhray yang benar. Adapun ayat yang dibaca dalam empat semester meliputi surat-surat yang terdapat dalam juz 1-10, yaitu surat Al Baqarah, Ali Imran, An Nisa, Al Maidah, Al An'am, Al A'roof Al Anfaal.
- b. Menghafal surat-surat pendek, yaitu surat Adl-Dluha sampai dengan surat An Naas.
- c. Menulis Ayat-ayat Al-Qur'an yang dihafal atau yang didengar dengan memperhatikan cara penulisan huruf yang benar sesuai dengan kaidah.
- d. Memahami dan menetapkan Ilmu tajwid tentang hukum bacaan nun mati/ tanwin, mim mati, mad, ro' dan lam serta tanda waqof dan washol.

Metode berasal dari bahasa Yunani (Greek) yaitu methe dan hodos berarti jalan atau cara. Yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu.⁵³ Dalam kamus istilah pendidikan dan umum disebutkan bahwa metode adalah cara yang telah diatur dan terpikirkan baik-baik untuk menyampaikan sesuatu maksud atau tujuan.⁵⁴ Seiring dengan itu, menurut Mahmud Yunus Metode adalah jalan yang hendak ditempuh oleh seseorang supaya sampai kepada tujuan tertentu, baik dalam lingkungan perusahaan atau perniagaan maupun dalam kumpulan ilmu pengetahuan dan lainnya.

Metode adalah cara atau langkah yang dianggap paling tepat baik dalam melaksanakan suatu kegiatan. Pengembangan adalah kegiatan menghasilkan sesuatu

yang bam melalui langkah-langkah penyusunan sesuatu secara sistematik atas dasar hasil penelitian yang dilakukan selama pengembangan.

Jadi metode pengembangan kurikulum muatan lokal adalah penerapan cara atau langkah yang secara ilmiah baik atau tepat dalam penyusunan program muatan lokal secara sistematik atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama pengembangan program muatan lokal untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Sedangkan menurut Oemar Hamalik pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik.⁵⁶ Sejalan dengan pengertian pengembangan kurikulum di atas, maka proses pengembangannya digambarkan oleh Chart bahwa seseorang dalam mengembangkan kurikulum dimulai dari kegiatan perencanaan kurikulum. Dalam menyusun perencanaan ini didahului oleh ide-ide yang akan dituangkan dan dikembangkan dalam program. Ide kurikulum tersebut bisa berasal dari:

- a. Visi yang dicanangkan, Visi (Vision) adalah the statement of ideas or hopes, yakni pernyataan tentang cita-cita atau harapan-harapan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan dalam jangka panjang.
- b. Kebutuhan stakeholders (siswa, masyarakat, pengguna lulusan), dan kebutuhan untuk studi lanjut.
- c. Hasil evaluasi kurikulum sebelumnya dan tuntutan perkembangan iptek dan zaman.
- d. Pandangan-pandangan para pakar dengan berbagai atar belakangnya.
- e. Kecenderungan era globalisasi, yang menuntut seseorang untuk memiliki etos belajar sepanjang hayat, melek sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi.

Kelima ide tersebut kemudian dikembangkan dalam program atau kurikulum sebagai dokumen, yang antara lain berisi: informasi dan jenis dokumen yang akan dihasilkan; bentuk/format silabus; dan komponen-komponen kurikulum yang harus dikembangkan. Apa yang tertuang dalam dokumen tersebut kemudian dikembangkan dan disosialisasikan dalam proses pelaksanaannya, yang dapat berupa pengembangan kurikulum dalam bentuk satuan acara pembelajaran atau SAP, proses pembelajaran dikelas atau luar kelas, serta evaluasi pembelajaran, sehingga diketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Dan evaluasi ini akan diperoleh umpan balik (feed back) untuk digunakan dalam penyempurnaan kurikulum berikutnya. Dengan demikian, proses pengembangan kurikulum menuntut adanya evaluasi secara berkelanjutan mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Ada dua pola pengembangan mata pelajaran muatan lokal dalam rangka menghadapi pelaksanaan KTSP. pola tersebut antara lain:

- a. Pengembangan muatan lokal sesuai dengan kondisi sekolah saat ini

Langkah dalam pengembangan mata pelajaran muatan lokal bagi sekolah yang memang tidak mampu mengembangkannya, langkah tersebut adalah:

- 1) Analisis mata pelajaran muatan lokal yang disekolah.
- 2) Bila mata pelajaran muatan lokal yang diterapkan disekolah tersebut masih layak digunakan maka kegiatan berikutnya adalah merubah mata pelajaran muatan lokal tersebut kedalam SK dan KD.
- 3) Bila mata pelajaran muatan lokal yang tidak layak lagi untuk diterapkan, maka sekolah bisa menggunakan mata pelajaran muatan lokal yang ditawarkan oleh dinas atau mengembangkan muatan lokal yang lebih sesuai.

b. Pengembangan muatan muatan lokal dalam KTSP

Pengembangan mata pelajaran muatan lokal sepenuhnya ditangani oleh sekolah dan komite sekolah yang membutuhkan penanganan secara profesional dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanaannya. Dengan demikian disamping mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional, perencanaan pengelolaan, maupun pelakasanaan muatan lokal memperhatikan keseimbangan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Penanganan secara profesional muatan lokal merupakan tanggung jawab pemangku kepentingan (Stakeholders) yaitu sekolah dan komite sekolah.

Pengembangan mata pelajaran muatan lokal oleh sekolah dan komite sekolah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah

Kegiatan ini dilakukan untuk menelaah dan mendata berbagai keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Data tersebut dapat diperoleh dan berbagai pihak yang terkait di daerah yang bersangkutan seperti Pemda/Bappeda, instansi vertikal terkait, perguruan tinggi, dan dunia industri/usaha. Keadaan seperti telah disebutkan tersebut dapat ditinjau dan potensi daerah yang bersangkutan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya dan kekayaan alam. Kebutuhan daerah dapat diketahui antara lain dari:

- 1) Rencana pembangunan daerah bersangkutan termasuk prioritas pembangunan daerah, baik pembangunan jangka pendek, pembangunan jangka panjang, maupun pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

- 2) Pengembangan ketenagakerjaan termasuk jenis kemampuan-kemampuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan.
 - 3) Aspirasi masyarakat mengenai pelestarian alam dan mengembangkan daerahnya serta konservasi alam dan pemberdayaannya.
- b. Menentukan fungsi dan susunan atau komposisi muatan lokal
- Berdasarkan kajian diatas dapat diperoleh berbagai jenis kebutuhan masyarakat. Berbagai jenis kebutuhan ini dapat mencerminkan fungsi muatan lokal didaerah, antara lain:
- 1) Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah;
 - 2) Meningkatkan keterampilan dibidang pekerjaan tertentu;
 - 3) Meningkatkan kemampuan berwirausaha;
 - 4) Meningkatkan penguasaan baca tulis Al-Qur'an untuk keperluan sehari-hari.
- c. Menentukan bahan kajian muatan lokal
- Penentuan bahan kajian muatan lokal didasarkan pada 'criteria sebagai berikut:
- 1) Kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik;
 - 2) kemampuan guru dan ketersediaan tenaga pendidik yang diperlukan;
 - 3) tersedianya sarana dan prasarana
 - 4) tidak bertentangan dengan agama dan nilai luhur bangsa
 - 5) tidak menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan
 - 6) kelayakan berkaitan dengan pelaksanaan disekolah
 - 7) lain-lain yang dapat dikembangkan sendiri sesuai dengan kondisi dan situasi daerah.
- d. Menentukan mata pelajaran muatan lokal

Kegiatan pembelajaran ini pada dasarnya dirancang agar bahan kajian muatan lokal dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional. Kegiatan ini berupa kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas, potensi daerah, dan prospek pengembangan daerah termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan kedalam mata pelajaran yang ada. Serangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah ditentukan oleh sekolah dan komite sekolah kemudian ditetapkan sekolah dan komite sekolah untuk dijadikan nama mata pelajaran muatan lokal. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.

e. Mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta silabus dengan mengacu pada standar isi yang ditetapkan oleh B SNP.

1) Pengembangan standar kompetensi dan kompetensi dasar adalah langkah awal dalam membuat mata pelajaran muatan lokal agar dapat dilaksanakan di sekolah. Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar adalah sebagai berikut:

(a) Pengembangan standar kompetensi

Standar kompetensi adalah menentukan kompetensi yang didasarkan pada materi sebagai basis pengetahuan.

(b) Pengembangan kompetensi dasar

Kompetensi dasar merupakan kompetensi yang harus dikuasai siswa.

Penentuan ini dilakukan dengan melibatkan guru, ahli bidang kajian, ahli dari instansi lain yang sesuai.

2) Pengembangan silabus secara umum mencakup:

- (a) Mengembangkan indikator
- (b) Mengidentifikasi materi pembelajaran
- (c) Mengembangkan kegiatan pembelajaran
- (d) Mengalokasikan waktu
- (e) Mengembangkan penilaian
- (f) Menentukan sumber belajar.

Kurikulum baca tulis Al-Qur'an dikembangkan dengan pendekatan sebagai berikut:

- a. Lebih menitik beratkan kompetensi disamping penguasaan materi.
- b. Lebih mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia.
- c. Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksana pendidikan dilapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

Kurikulum baca tulis Al-Qur'an yang dikembangkan dengan pendekatan tersebut diharapkan mampu menjamin pertumbuhan keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha Esa.

Sekolah dan komite sekolah mempunyai wewenang penuh dalam mengembangkan program muatan lokal. Bila dirasa tidak mempunyai SDM dalam

mengembangkan sekolah dan komite sekolah dapat bekerja sama dengan unsur-unsur Depdiknas seperti Tim pengembang kurikulum (TPK) didaerah, lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP), perguruan tinggi dan instansi/lembaga diluar depdiknas, misalnya pemerintah Daerah/Bapeda, Dinas Departemen lain, dunia usaha/industri, tokoh masyarakat. Namun pengembangan kurikulum muatan lokal disetiap daerah dan wilayah pada dasarnya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan tiap Propinsi, dan Kepala Dinas Pendidikan tiap kota dan kabupaten, seperti halnya kurikulum muatan lokal baca tulis Al-Qur'an yang dikembangkan berada dibawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota.

Adapun langkah-langkah pengembangan kurikulum muatan lokal tingkat kota dan kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji kelayakan usulan mata pelajaran muatan lokal dari setiap kecamatan.
- b. Menentukan mata pelajaran muatan lokal yang layak untuk dilaksanakan di kota/kabupaten, berdasarkan usulan dari setiap kecamatan, dengan berbagai pertimbangan dari tim pengembang kurikulum (TPK) muatan lokal tingkat kota/kabupaten, untuk diusulkan ke dinas Pendidikan Propinsi.
- c. Memilih dan mengembangkan mata pelajaran muatan lokal yang telah ditetapkan kepada Dinas Pendidikan Propinsi untuk SMA, dan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota/kabupaten untuk SD dan SMP.
- d. Dalam pelaksanaannya, disamping mata pelajaran muatan lokal wajib, setiap sekolah diberikan keluesan untuk memilih dan mengembangkan mata pelajaran muatan lokal yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan masing-masing.

Penilaian/evaluasi merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

Evaluasi atau penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.

Dalam hal ini, evaluasi kurikulum muatan lokal pembelajaran baca tulis Al-Qur'an yang dilakukan meliputi evaluasi kemajuan belajar dan evaluasi hasil belajar peserta didik dan terdiri dari pengetahuan, sikap serta keterampilan.

Evaluasi kemajuan belajar merupakan pengumpulan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan dasar yang dicapai peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam kurun waktu, unit satuan atau jenjang tertentu.

Sedangkan evaluasi hasil belajar Al-Qur'an adalah upaya pengumpulan informasi untuk menentukan tingkat penguasaan peserta didik terhadap suatu kompetensi meliputi: pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai. Hasil penilaian/evaluasi dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam memasuki pendidikan jenjang berikutnya.

Evaluasi hasil belajar Al-Qur'an secara regional dilakukan dengan mengacu kepada kompetensi, dasar, hasil belajar, materi standar, dan indikator yang ditetapkan

didalam kurikulum muatan lokal baca tulis Al- Qur'an. Penilaian/ evaluasi secara regional berfungsi untuk memperoleh informasi dan data tentang mutu hasil penyelenggaraan mata pelajaran baca tulis Al-Quran

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian/ evaluasi antara lain:

- a. Penilaian/ evaluasi diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.
- b. Penilaian menggunakan acuan 'criteria; yaitu berdasarkan apa yang
- c. bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.
- d. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan.
Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.
- e. Hasil penilaian/ evaluasi di analisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remidi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya dibawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan.
- f. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses (keterampilan proses) misalnya teknik wawancara, maupun produk/ hasil melakukan observasi lapangan yang bermula informasi yang dibutuhkan.

8. Metode dan Strategi Pengajaran Bacaan Aksara Al-Qur'an

Idealnya, pengajaran Al-Qur'an terutama dalam aspek bacaan aksara Al-Qur'an, memiliki metode dan strategi tertentu. Dalam buku Pedoman Pengajaran Al-

Qur'an yang diterbitkan Departemen Agama, menyebutkan empat metode yang digunakan oleh sebagian guru dalam mengajarkan aksara Al-Qur'an, yakni:

Metode tarkibiyah (metode sintetik), yakni metode pengajaran membaca dimulai dari mengenal huruf hijaiyyah. Kemudian diberi tanda baca/harakat, lalu disusun menjadi kalimat (kata), kemudian dirangkaian dalam suatu jumlah (kalimat).

Metode shautiyyah (metode bunyi), yakni dimulai dengan bunyi huruf aksara, bukan nama-nama huruf contoh: Aa-Ba-Ta dst. Dari bunyi ini disusun menjadi satu kata yang kemudian menjadi kata atau kalimat yang teratur.

Metode musyafahah (metode meniru), adalah meniru dari mulut ke mulut atau mengikuti bacaan seorang guru, sampai hafal. Setelah itu, baru diperkenalkan beberapa buah huruf beserta tanda baca/harakat dari kata-kata atau kalimat yang dibacanya itu.

Metode Jaami'ah (metode campuran), adalah metode yang menggabungkan metode-metode tersebut di atas (1,2,3) dengan jalan mengambil kebaikan-kebaikannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Di samping itu, ditemukan pula berbagai metode lain dalam literatur yang berbeda, yang kesemuanya saling melengkapi. Metode-metode yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Metode al-Barqi, adalah metode mengembangkan pengajaran baca tulis dalam berbagai bahasa dengan menggunakan pendekatan global yang bersifat struktural, analitis dan sistesis (SAS), yang dalam hal ini terbagi dua yaitu:
 - 1) SAS murni, adalah penggunaan bahasa antara tulisan dengan bunyi tidak sama, seperti: one, two, three. Jadi SAS murni ini cocok dengan pelajaran bahasa Inggris.

2) Semi SA, adalah penggunaan struktur kata atau kalimat, yang tidak mengikutkan bunyi mati sukun atau kalimat, yang tidak mengikutkan bunyi mati atau sukun, umpamanya: jalasa, kataba, sehingga penyusunan bahasa Arab dan Indonesia lebih cocok menggunakan semi SAS.

b. Metode hattaiyyah, adalah cara belajar Al-Qur'an dengan pengenalan huruf, tanda baca, melalui huruf latin. Awal pengenalan huruf al-Qur'an dimulai dengan Lam, bukan Alif. Huruf Al-Qur'an yang sulit diajarkan, paling akhir diberikan, sebab agak susah persamaan lainnya.

c. Metode iqra', adalah metode belajar Al-Qur'an dengan menggunakan sistem :

- 1) Cara belajar siswa aktif (CBSA), guru sebagai penyimak saja.
- 2) Privat, penyimakan secara seorang demi seorang
- 3) Asistensi, yakni setiap santri yang lebih tinggi pelajarannya diharapkan membantu menyimak santri lain.

Metode terakhir yang disebutkan di atas (metode iqra') pada umumnya digunakan di TPA/TPQ yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian dalam menyampaikan metode-metode pengajaran sebagaimana yang telah disebutkan memerlukan beberapa strategi, misalnya:

- a. Persuasif, cara ini diusahakan anak belajar Al-Qur'an dengan keasadaran yang tinggi, sehingga mereka membaca Al-Qur'an merupakan suatu kebutuhan.
- b. Sugestif, yakni anak didik diberikan dorongan dari sisi lain (bukan kesadaran) tetapi berupa hadiah atau penghargaan, rekreatif, dan dijaga agar dorongan berupa hadiah dan semacamnya tidak menjadi motivasi utama dalam belajar Al-Qur'an.
- c. Campuran, yakni strategi persuasif dan sugestif dapat dipadukan dalam kondisi

tertentu.

Untuk kelengkapan strategi pengajaran baca Al-Qur'an, Syarifuddin Ondeng telah merumuskan beberapa strategi lain yang secara terstruktur terdiri atas empat, yakni seleksi bahan; gradasi; presentasi dan repetisi. Berikut ini dikemukakan satu persatu:

- a. Seleksi bahan, yakni bahan yang akan diajarkan adalah 29 huruf hijaiyyah, tiga buah baris (harakat); tiga buah tanwin; tiga buah bentuk madd, tanda sukun dan tanda tasyid.
- b. Gradasi, yakni bahan yang telah diseleksi untuk diajarkan, perlu diatur penyampainnya. Misalnya, huruf-huruf itu diajarkan bersama dengan barisnya. Dalam hal ini, fathah, kasrah, dhammah, kemudian diajarkan madd, kemudian tanwin. Mengenai sukun dan tanwin, perlu diberikan semenjak dini mengingat banyaknya frekuensinya.
- c. Presentasi, yakni di dalam presentasi akan dilihat bahwa tiap bahan yang akan diajarkan dibagi kepada unsur bari, bahan utama dan bahan latuhan. Pengulangan bahan yang tidak diberikan tidak hanya terdapat di dalam bahan utama tetapi juga di dalam latihan.
- d. Repetisi, yakni hendaknya bahan yang utama dipilih untuk diajarkan adalah frase bismi (بسم) dalam bismillah (بسم الله), karena frekuensi penggunannya yang amat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Juga karena huruf-hurufnya terdapat di dalam bahasa Indonesia dan juga karena di sana hanya terdapat dua tanda baca yaitu; kasrah dan sukun

B. Penelitian Terdahulu

1. Masyrifah, Dewi (2009). Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an Di SMP Negeri 2 Purwodadi Pasuruan. Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan proses penyusunan kurikulum muatan lokal pembelajaran baca tulis Al-Qur'an di SMP Negeri 2 Purwodadi Pasuruan, (2) untuk mendeskripsikan pelaksanaan kurikulum muatan lokal pembelajaran baca tulis Al-Qur'an di SMP Negeri 2 Purwodadi Pasuruan. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui interview, observasi dan dokumentasi, dengan informannya adalah Kepala Sekolah, Waka Kurikulum dan guru baca tulis Al-Qur'an di SMP Negeri 2 Purwodadi Pasuruan. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikan data-data yang telah didapat sehingga akan menggambarkan realitas yang sebenarnya sesuai dengan fenomena yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan kurikulum muatan lokal baca tulis Al-Qur'an berdasarkan peraturan daerah nomor 17 tahun 2006 bahwa muatan lokal yang ditetapkan ditingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yang ada dikabupaten Pasuruan adalah berupa baca tulis Al-Qur'an (BTQ); Dan adapun yang membuat atau yang menyusun kurikulum muatan local baca tulis Al- Qur'an adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dikoordinasi oleh diknas untuk membuat rambu-rambu kemudian diolah oleh tim kabupaten setelah sudah jadi di terjemahkan oleh masing-masing guru mata pelajaran baca tulis Al-Qur'an disekolah. Dalam melaksanakan pembelajaran Baca tulis Al-Qur'an

terlebih dahulu guru harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dengan mengikutsertakan tenaga pendidiknya dalam pelatihan-pelatihan, diskusi/sharing bersama dengan sesama guru; Pelaksanaan kurikulum muatan lokal menggunakan pendekatan monolitik dalam arti kurikulum muatan lokal diberikan secara tersendiri, dengan menyiapkan perencanaan pembelajaran. yakni merencanakan kegiatan pembelajaran yang meliputi penyusunan silabus, analisis hari efektif, membuat RPP, media pembelajaran. Sesuai hasil penelitian di SMP Negeri 2 Purwodadi Pasuruan Minimnya jam pelajaran Baca tulis Al-Qur'an (2 jam), memang dirasa sangat tidak memadai dalam meningkatkan prestasi siswa, khususnya tentang kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an. Untuk itu, berbagai kebijakan yang telah ditempuh dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca dan menulis Al-Qur'an perlu dipertahankan dan dikembangkan.

C. Kerangka Pemikiran

Bawa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten kepulauan Selayar, khususnya mengenai pemberantasan buta aksara Al-Qur'an dan penyuksesan program pendidikan untuk semua (education for all) antara lain perlu didukung kemampuan baca tulis aksara bagi seluruh penduduk, terkhusus buta aksara Al-Qur'an.

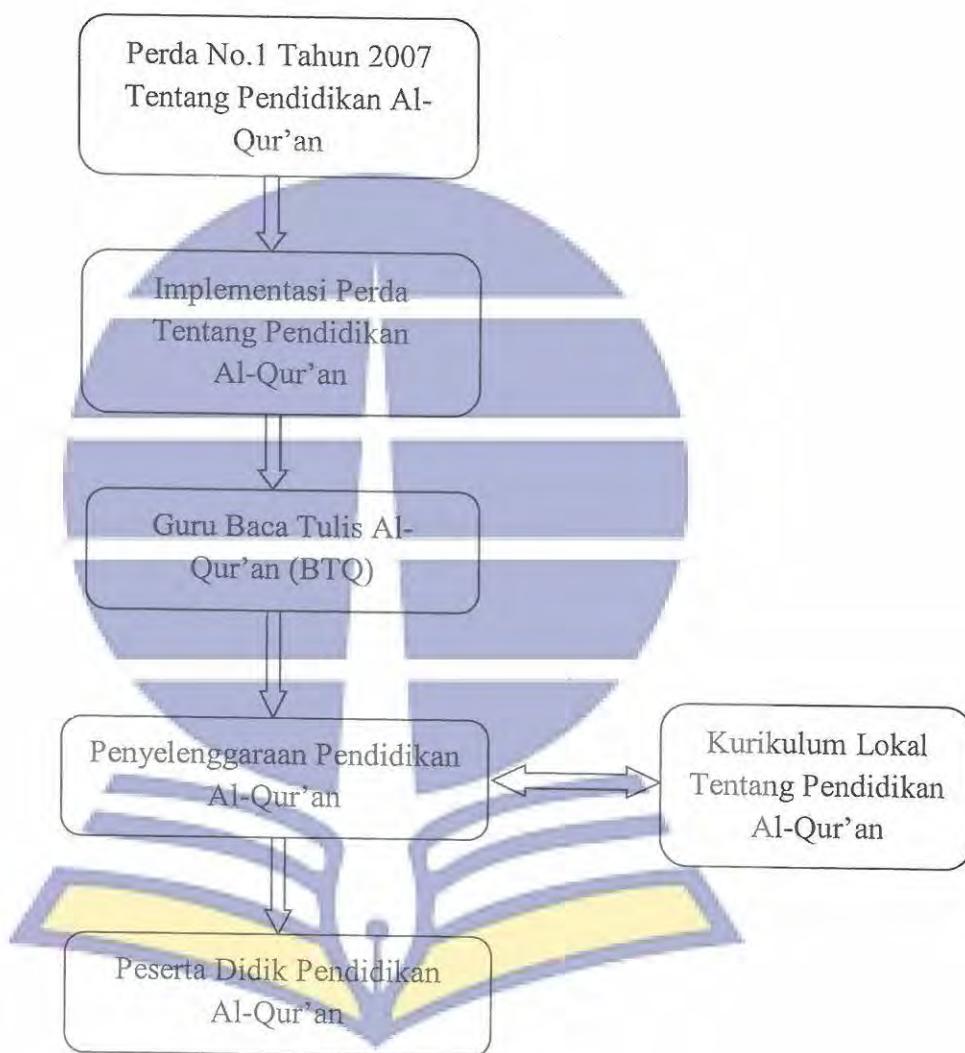
Bawa kondisi kemampuan baca tulis aksara Al-Qur'an pada penduduk Kabupaten kepulauan Selayar, saat ini, masih terdapat di antaranya yang belum dapat membaca dan menulis aksara, sehingga diperlukan gerakan bebas buta aksara secara berkesinambungan. Persoalan ketidakmampuan siswa dalam membaca dan menulis Al-Qur'an memang sudah merupakan problem hampir seluruh sekolah-sekolah.

Kegiatan membaca Al-Qur'an bagi setiap Muslim adalah suatu keharusan. Itulah sebabnya, bukan secara kebetulan kalau ayat pertama dari al-Qur'an yang diturunkan adalah iqra' atau perintah membaca. Hanya saja, yang menjadi persoalan adalah, masih ditemukan sebagian umat Islam, terutama para pelajar yang belum pandai membaca al-Qur'an. Hal tersebut disebabkan mereka masih buta terhadap aksara-akasara Al-Qur'an. Karena itu, perlu diketahui bagaimana respon masyarakat terhadap upaya pemberantasan bebas buta aksara Al-Qur'an.

Dengan demikian Pemda Kabupaten kepulauan Selayar membuat dan mensyahkan Perda No.1 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Al-Qur'an. Implementasi Perda No.1 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Al-Qur'an ini adalah dengan pengangkatan guru Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) yang ditempatkan pada beberapa Sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar mulai dari SD sampai SMA/SMK. Untuk menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an maka dipakai kurikulum BTQ dari Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dimasukkan ke dalam kurikulum lokal dengan harapan mampu meningkatkan pemberantasan buta baca tulis aksara Al-Qur'an pada peserta didik yang beragama islam di Kabupaten kepulauan Selayar.

Untuk memperjelas alur penelitian ini maka dirumuskan dalam bentuk skema kerangka konseptual di bawah ini.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Paparannya akan meliputi :

A. Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif Denzin dan Lincoln (1994:2) dalam Emzir (2010:1) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut:

“Qualitative research is multimethod in focus, involving an interpretive, naturalistic approach to its subject matter. This means that qualitative researchers study in their natural setting, attempting to make sense of or interpret phenomena in terms of the meanings people bring to them. Qualitative research involves the studied use and collection of a variety of empirical materials-case study, personal experience, introspective, life story, interview, observational, historical, interaksional, and visual texts—that describe routine and problematic moment and meaning in individuals’lives.”

Definisi ini menyarankan suatu pendekatan *a priori* yang didasarkan pada asumsi filosofis (pendekatan naturalistik interpretatif) pada penelitian kualitatif dan sumber-sumber informasi jamak dan pendekatan naratif yang tersedia bagi peneliti.

Pendekatan kualitatif ini akan mendorong Peneliti terjun ke lapangan dan mengamati secara langsung aktivitas-aktivitas yang dilakukan di lokasi penelitian, untuk memperoleh gambaran dan data-data terkait masalah penelitian yaitu Implementasi Perda No.1 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di beberapa Sekolah Dasar di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan Dapodik Kabupaten Kepulauan Selayar, Jumlah Sekolah Dasar Negeri maupun Swasta di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar berjumlah 11. Pada penelitian ini, Sekolah Dasar yang dijadikan Lokasi penelitian berjumlah 4 SD, dengan rincian sebagai berikut:

1. SDN Benteng I
2. SD Inpres Benteng Timur
3. SD Inpres Benteng I
4. SD Negeri Benteng III

C. Sumber Data

Data penelitian ini bersumber dari data primer maupun data sekunder. Menurut Lofland dan Lofland (1987:47) dalam Moleong (2010:157) bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan; selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.”

Sumber data primer adalah informasi dan data yang diperoleh dari informan yaitu:

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Guru Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) pada SD Negeri Benteng I.
3. Guru Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) pada SD Inpres Benteng Timur
4. Guru Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) pada SD Inpres Benteng I
5. Guru Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) pada SD Negeri Benteng III

Sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari buku, pedoman dan

referensi yang terkait termasuk data pedoman atau peraturan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar.

D. Instrumen Penelitian

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan peneliti lah yang menentukan keseluruhan skenarionya (Moleong:2010:163). Instrumen penelitian atau alat pengumpul data dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri dengan mengembangkan instrument penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui studi kepustakaan, observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian perlu dilakukan pengumpulan data melalui cara-cara atau teknik tertentu. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif antara lain menggunakan wawancara, pengamatan atau observasi, dokumen-dokumen.

Anselm Strauss & Juliet Corbin (2010:7) mengemukakan bahwa: "Pada dasarnya ada tiga unsur utama dalam penelitian kualitatif. Pertama, data bisa berasal dari bermacam sumber; biasanya dari wawancara dan pengamatan. Unsur Kedua penelitian kualitatif terdiri dari berbagai prosedur analisis dan interpretasi yang digunakan untuk mendapatkan temuan dan teori. Kedua prosedur ini mencakup teknik-teknik untuk memahami data. Proses ini yang disebut "penandaan" (coding), bisa bermacam-macam sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, dan tujuan peneliti

(lihat Becker 1970; Cahrnaz, 1983; Lofland 1971; dan Miles & Huberman 1984).

Prosedur-prosedur lain yang juga merupakan bagian dari analisis meliputi sampling nonstatistik (lihat Schatzman & Strauss, 1973), penulisan memo, dan pembuatan diagram hubungan konseptual. Unsur Ketiga dalam penelitian kualitatif adalah laporan tertulis dan lisan.”

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi (pengamatan), wawancara (depth interview), dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong: 2010:186).

Wawancara dilakukan oleh Peneliti dengan aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan informan pendukung pertanyaan yang terkait

dengan menggunakan pedoman wawancara yang mengarah pada fokus penelitian.

Pedoman wawancara bersifat fleksibel, artinya masih terbuka kemungkinan untuk mengembangkan pertanyaan langsung apabila ternyata jawaban yang diberikan oleh informan belum selesai atau belum memadai agar data atau informasi yang diperoleh selengkap mungkin.

2. Pengamatan

Pengamatan dilakukan secara langsung oleh peneliti, untuk mengetahui/mengamati fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang terkait dengan di Implementasi Perda No.1 Tahun 2007 Tentang Pembelajaran Al-Qur'an terhadap Pemberantasan Buta Baca Huruf Al-Qur'an di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk itu, peneliti menyiapkan alat tulis untuk menulis catatan-catatan

atau memo dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara. Pengamatan dilakukan untuk memverifikasi kebenaran data hasil wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menelaah bahan tertulis yang berupa data sekunder yang bersumber dari pedoman, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi aparat kecamatan, buku-buku literatur dan lainnya.

F. Metode Analisis Data

Penelitian secara deskriptif analisis di sini dimaksudkan untuk mendeskripsikan data penelitian, tanpa melakukan pengujian hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis, karena dalam penelitian ini penulis tidak membuat hipotesis. Selain melakukan analisis, hasil penelitian akan diterjemahkan, dan diuraikan secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran mengenai situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian ini, data akan dianalisis secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan data hasil temuan di pilah-pilah yang terkait dengan permasalahan penelitian agar tidak bias kemudian disusun secara sistematis mana data yang perlu dan sesuai dan mana yang tidak perlu (reduksi data), lalu dilakukan analisis dan interpretasi atau penafsiran dan triangulasi serta menarik kesimpulan. Triangulasi yang dimaksud disini adalah pemeriksaan keabsahan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Artinya untuk mengetahui informasi yang diberikan informan yang satu perlu kita menggali lagi informasi dari informan yang lain untuk menguatkan informasi yang disampaikan sebelumnya sehingga kita

dapat memahami atau memaknai suatu gejala atau fakta dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

G. Defenisi Operasional

1. Perda No.1 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Al-Qur'an adalah Perda yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk pandai membaca dan memahami serta mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
2. Implementasi Perda No.1 Tahun 2007 adalah Implementasi perda Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pendidikan Al-Qur'an.
3. Guru Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) adalah guru yang khusus diangkat dan bertugas untuk mengajar Baca Tulis Al-Qur'an dan ditempatkan pada beberapa Sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar mulai dari SD sampai SMA/SMK
4. Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an adalah Kegiatan Pendidikan Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Kurikulum Lokal Tentang Pendidikan Al-Qur'an adalah Kurikulum Lokal pada Kabupaten Kepulauan Selayar yang acuannya memakai kurikulum BTQ dari Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
6. Peserta Didik Pendidikan Al-Qur'an adalah Warga Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang menempuh pendidikan dari SD sampai SMA/SMK pada lingkup Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB IV

TEMUAN DAN BAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Benteng

Gambaran umum kondisi wilayah memberikan informasi penting dalam merencanakan pembangunan, karena kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang bisa mempengaruhi optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan di Tingkat Kecamatan. Gambaran umum kondisi daerah Kecamatan Benteng, menjelaskan secara singkat tentang kondisi geografis, iklim, demografi, fungsi, dan wilayah administratif.

1. Letak Geografis dan Keadaan Penduduk

Benteng adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Kepulauan Selayar, provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Benteng merupakan ibukota kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas wilayah pada bagian utara berbatasan dengan kecamatan Benteng sementara bagian timur, selatan dan bagian barat berbatasan dengan kecamatan Bontoharu. Kecamatan ini berada di pinggir laut (berhadapan langsung dengan Pulau Pasi) di mana sarana transportasi dari luar yang paling dekat adalah Dermaga Rauf Rahman. Lapangan udara terdekat dan satu-satunya yang ada di Kepulauan Selayar adalah Bandar Udara H. Aroeppala yang terletak di Padang beberapa kilometer di sebelah selatan Benteng tepatnya di desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Ibu kota kecamatan Benteng terletak di kelurahan Benteng. Kecamatan Benteng terletak pada 120027' – 120030' BT 6006' – 6008' LS.

Luas Kecamatan Benteng adalah seluas 7.12 km² (2.75 mil²). Populasi Penduduk di Kecamatan Benteng : 21.344 Jiwa (2010). Kepadatan Penduduk: 3,000/km² (7,800/sq mi). Jumlah Kelurahan ada 3, yaitu Benteng Utara, Benteng dan Benteng Selatan.

B. Gambaran Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar

a. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar, mempunyai tugas pokok :

- 1) Membantu Bupati dalam penyelenggaraan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang pendidikan.
- 2) Merumuskan kebijakan teknis, perencanaan, pengorganisasian, Pengendalian, Pengarahan dan Pengawasan serta evaluasi pembangunan di bidang pendidikan.
- 3) Melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
- 4) Memberdayakan peran serta masyarakat (Dewan Pendidikan) dan Pengembangan kerjasama instansi teknis dalam pengelolaan Pendidikan.

b. Fungsi

- 1) Penyiapan bimbingan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
- 2) Pemberdayaan peran serta masyarakat (Dewan Pendidikan) dan pengembangan kerjasama antara instansi teknis dalam pengelolaan pendidikan;

- 3) Mengkoordinasikan program pendidikan di tingkat provinsi dan pusat
 - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Bupati.
- c. Struktur Organisasi
- 1) Kepala Dinas Pendidikan
 - 2) Sekretaris sebagai unsur pelayanan teknis administratif di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, unsur umum dan Kepegawaian, Hukum dan Perencanaan, serta Unsur Keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a) Pelaksanaan analisis dan penilaian kinerja organisasi, penataan dan peningkatan kapasitas dan tata laksana, penyusun sistem dan prosedur kerja.
 - b) Pelaksanaan koordinasi perumusan program perencanaan baik kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan.
 - c) Pelaksanaan pengadaan, penggandaan, mutasi, pengembangan disiplin dan pemberhentian pegawai.
 - d) Pelaksanaan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumatanggaan, pengelolaan dokumentasi kepegawaian.
 - e) Pelaksanaan administrasi kepegawaian.

- f) Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas dan mengkoordinasikan tugas kebendaharaan.
- g) Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program rutin dalam pembangunan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris didukung dengan 3 (tiga) kepala sub bagian yaitu ;

- a) Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian.
- b) Kepala Sub Bagian Hukum dan Perencanaan.
- c) Kepala Sub Bagian Keuangan.

- 3) Kepala Bidang Olahraga dan Pembinaan Prestasi Pelajar yang mempunyai tugas pokok penyiapan bahan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta evaluasi di bidang olahraga dan pembinaan prestasi pelajar. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Olahraga dan Pembinaan Prestasi Pelajar didukung dengan 3 (tiga) kepala seksi yaitu :

- a) Kepala Seksi Pembinaan Olahraga dan Prestasi pelajar TK-SD.
- b) Kepala Seksi Pembinaan Olahraga dan Prestasi pelajar SMP, SMA dan SMK.
- c) Kepala Seksi Pembinaan Guru Olahraga.

- 4) Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pendidikan dasar. Dalam menyelenggarakan tugas pokok kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar.
- b) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan dasar.
- c) Pemberian Rekomendasi izin pembukaan TK, SD.
- d) Usulan perencanaan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar dan TK.
- e) Penyusunan analisa kebutuhan, pengadaan, mutasi, pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada tingkat pendidikan dasar.
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar didukung dengan 3 (tiga) kepala seksi yaitu :

- a) Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar TK/SD.
 - b) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar TK/SD
 - c) Kepala Seksi Tenaga Guru TK/SD
- 5) Kepala Bidang Pendidikan Menengah yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pendidikan menengah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok kepala Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :
- a) Pelaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pendidikan menengah.
 - b) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan menengah.
 - c) Pemberian rekomendasi izin pembukaan SMP, SMA, SMK Negeri dan Swasta.

- d) Usulan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan menengah.
- e) Penyusunan analisa kebutuhan, pengadaan, mutasi, pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada tingkat pendidikan menengah.
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pendidikan Menengah didukung dengan 3 (tiga) kepala seksi yaitu :

- a) Kepala Seksi Tenaga Guru SMP, SMA dan SMK
 - b) Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah
 - c) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
- 6) Kepala Bidang Pendidikan Non Formal yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pendidikan non formal.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok kepala Bidang pendidikan Non Formal mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pendidikan nonformal.
 - b) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan nonformal.
 - c) Pemberian rekomendasi izin pembukaan Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain dan lembaga PAUD lainnya.
- d) Penyusunan analisa kebutuhan, pengadaan, mutasi, pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini.
 - e) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pendidikan Non Formal, didukung 3(tiga) kepala seksi yaitu :

- a) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
- b) Kepala Seksi Keaksaraan
- c) Kepala Seksi Kesetaraan

2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar

- a. Visi Dinas Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2015 yaitu, “Terselenggaranya Layanan Pendidikan Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Membentuk Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Profesional Dan Religius “.
- b. Misi Dinas Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2015 yaitu :
 - 1) Meningkatkan Pemerataan Pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
 - 2) Meningkatkan manajemen kependidikan.
 - 3) Meningkatkan Profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
 - 4) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
 - 5) Meningkatkan kompetensi lulusan pada semua jenjang pendidikan.
 - 6) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan nonformal dan informal.
 - 7) Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.

3. Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar

- a. Tujuan

Untuk mengaktualisasikan misi yang akan dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Nasional, maka misi tersebut diformulasikan dalam tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan ketersediaan satuan pendidikan sesuai kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.
- 3) Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidang tugas masingmasing.
- 4) Meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung pendidikan pada setiap satuan dan jenjana pendidikan.
- 5) Meningkatkan kualitas pembelajaran pada setiap satuan dan jenjang pendidikan.
- 6) Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan nonformal dan informal.
- 7) Meningkatkan pembinaan layanan pendidikan kepemudaan
- 8) Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga, seni dan keagamaan.
- 9) Meningkatkan pembinaan guru olahraga.

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan, adalah:

- 1) Meningkatnya akses belajar bagi anak usia sekolah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- 2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan.
- 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan.
- 4) Meningkatnya kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidang tugas yang diampunya.

- 6) Meningkatnya ketersediaan fasilitas pembelajaran.
- 7) Meningkatnya hasil ujian akhir pada setiap satuan pendidikan.
- 8) Meningkatnya angka yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- 9) Meningkatnya layanan pendidikan terhadap anak usia dini.
- 10) Meningkatnya layanan pendidikan kecakapan hidup (life skill) dan KBU.
- 11) Meningkatnya layanan pendidikan kesetaraan.
- 12) Meningkatnya layanan pendidikan keaksaraan fungsional
- 13) Meningkatnya pembinaan ekstrakurikuler di sekolah.
- 14) Meningkatnya prestasi pelajar di bidang olahraga.
- 15) Meningkatnya prestasi pelajar di bidang seni dan keagamaan.
- 16) Meningkatnya kualitas dan kompetensi guru olahraga.

4. Rencana Program Dan Kegiatan Tahunan

- a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun, dengan beberapa kegiatan
 - 1) Pembangunan gedung sekolah
 - 2) Penambahan ruang kelas sekolah
 - 3) Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
 - 4) Penambahan ruang guru sekolah.
 - 5) Pembangunan sarana/prasarana olahraga
 - 6) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa.
 - 7) Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
 - 8) Pembangunan ruang serbaguna/aula

- 9) Pembangunan perpustakaan sekolah
- 10) Pemeliharaan berkala perpustakaan sekolah
- 11) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
- 12) Rehabilitasi sedang /berat ruang guru sekolah
- 13) Rehabilitasi sedang/ berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah
- 14) Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
- 15) Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah
- 16) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas, kepala sekolah, guru,penjaga sekolah
- 17) Pelatihan kompotensi tenaga pendidik
- 18) Pelatihan kompotensi siswa berprestasi
- 19) Pelatihan penyusunan kurikulum
- 20) Penambahan ruang kelas baru
- 21) Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MISDLB dan SMP/MTs
- 22) Penyelenggaraan Paket A setara SD
- 23) Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
- 24) Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan Pendidikan Dasar
- 25) Penyelenggaraan ujian akhir nasional
- 26) Penyelenggaraan ujian akhir sekolah
- 27) Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa
- 28) Penyelenggaraan olimpiade siswa
- 29) Penyelenggaraan Pengawasan pendidikan
- 30) Pemberdayaan pengawas sekolah

-
- 31) Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
 - 32) Penyediaan beasiswa retrival untuk anak putus sekolah
 - 33) Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
 - 34) Penyelenggaraan Multi-grade teaching di daerah terpencil
 - 35) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- b. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan kegiatan
- 1) Pelaksanaan sertifikasi pendidik
 - 2) Pelaksanaan uji kompotensi pendidik dan tenaga kependidikan
 - 3) Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
 - 4) Pembinaan kelompok kerja guru
 - 5) Pengembangan mutu dan kualitas kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
 - 6) Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
 - 7) Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
 - 8) Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
 - 9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

C. Implementasi Perda No.1 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar

Pada Perda No.1 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Qur'an tujuan dan sasaran yang hendak dicapai adalah mengembang potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, pandai membaca dan memahami serta mengamalkan kandungan Al-Qu'ran. Sedangkan Sasaran Pendidikan Al-Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar (Drs. Mustakim KR, M.Mpd), didapat informasi bahwa Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2007 ditandai dengan pengangkatan guru Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) yang ditempatkan pada beberapa Sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar mulai dari SD sampai SMA/SMK. Perekutan guru BTQ sejak tahun 2007 untuk ditempatkan di sekolah-sekolah. Jumlah guru Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) adalah sebanyak 95 orang dan disebar ke beberapa SD, SMP, dan SMA/SMK.

Dalam Pendidikan Al-Qur'an harus ada acuan dasar yang dipedomani oleh guru Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ), akan tetapi kurikulum BTQ yang dipakai adalah kurikulum BTQ dari Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari fakta yang terungkap pada wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar (Drs. Mustakim KR, M.Mpd), bahwa sejak tahun 2009 pengelolaan pendidikan Al-Qur'an diambil alih Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Padahal Pendidikan Al-Qur'an seharusnya berada dibawah kendali Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini dikarenakan ada kepentingan tertentu sehingga pada pengajuan anggaran pelaksanaan dan pengelolaan BTQ di sekolah mendapat tanggapan beragam dan akhirnya bagian Kesra yang berhasil menganggarkan kegiatan

ini dengan mengacu pada pelaksanaan pembangunan dan kegiatan keagamaan di pemerintah daerah.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar (Drs. Mustakim KR, M.Mpd), harapan beliau bahwa Pelaksanaan Perda ini perlu dievaluasi untuk mengetahui tingkat efektifitasnya dan sektor-sektor apa yang dilibatkan dalam pelaksanaannya karena perda ini sangat luas cakupannya yang meliputi pendidikan formal, informal, maupun non formal. Isi perda ini tidak hanya terfokus pada baca tulis Al-Qur'an tetapi meliputi penghayatan, pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaiknya untuk pendidikan Al-Qur'an di pendidikan formal diserahkan kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasinya, selamanya ini tidak diketahui output pada pelaksanaan PBM BTQ di sekolah-sekolah.

Implementasi Kebijakan pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakan namun juga melingkupi tindakan-tindakan atau perilaku individu-individu dan kelompok pemerintah dan swasta, serta badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dalam mencapai tujuan, akan tetapi juga mencermati berbagai kekuatan politik, sosial, ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai. Dengan demikian, implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan

persoalan administratif, tetapi mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Perda No.1 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar

1) Komunikasi

Persyaratan bagi implementasi yang efektif adalah mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, untuk itu sangat diperlukan komunikasi yang baik dan lancar, komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

Komunikasi merupakan elemen yang sangat penting dalam implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2007, karena melalui komunikasi berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut dapat diketahui oleh kelompok sasaran kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar (Drs. Mustakim KR, M.Mpd), bahwa sejak tahun 2009 pengelolaan pendidikan Al-Qur'an diambil alih Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, padahal ini adalah tanggung jawab Dinas Pendidikan Nasional dalam implementasi perda tentang pendidikan Al-Qur'an. Hal ini disebabkan ada kepentingan tertentu sehingga pada pengajuan anggaran pelaksanaan dan pengelolaan BTQ di sekolah mendapat tanggapan beragam dan akhirnya bagian Kesra yang berhasil menganggarkan kegiatan ini dengan mengacu pada pelaksanaan pembangunan dan kegiatan keagamaan di pemerintah daerah.

Untuk itu sangat diperlukan komunikasi yang baik dan lancar, komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

2) Sumber daya

Sumber daya memegang peranan yang penting dikarenakan apabila dari pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijaksanaan maka implementasi mungkin berjalan tidak efektif. Sumber daya yang dimaksud disini adalah staf yang mempunyai *skill* memadai untuk melaksanakan tugas-tugasnya, informasi mengenai pelaksanaan, kebijakan atau data-data yang akurat dan wewenang serta fasilitas yang diperlukan.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar (Drs. Mustakim KR, M.Mpd), didapat informasi bahwa Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2007 ditandai dengan pengangkatan guru Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) yang ditempatkan pada beberapa Sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar mulai dari SD sampai SMA/SMK. Perekutan guru BTQ sejak tahun 2007 untuk ditempatkan di sekolah-sekolah. Jumlah guru Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) adalah sebanyak 95 orang dan disebar ke beberapa SD, SMP, dan SMA/SMK. Akan tetapi sejak tahun 2009 pengelolaan pendidikan Al-Qur'an diambil alih Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Maka penambahan Jumlah guru Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) menjadi tidak jelas.

3) Sikap pelaksana dan kecenderungan pelaksana

Apabila pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, kemungkinan besar mereka melaksanakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat

keputusan. Begitu juga berlaku sebaliknya apabila terjadi hal yang berlawanan. Dengan demikian kecenderungan-kecenderungan pelaksana biasanya menimbulkan pengaruh terhadap kelancaran implementasi, baik yang mendukung maupun yang menghambatnya.

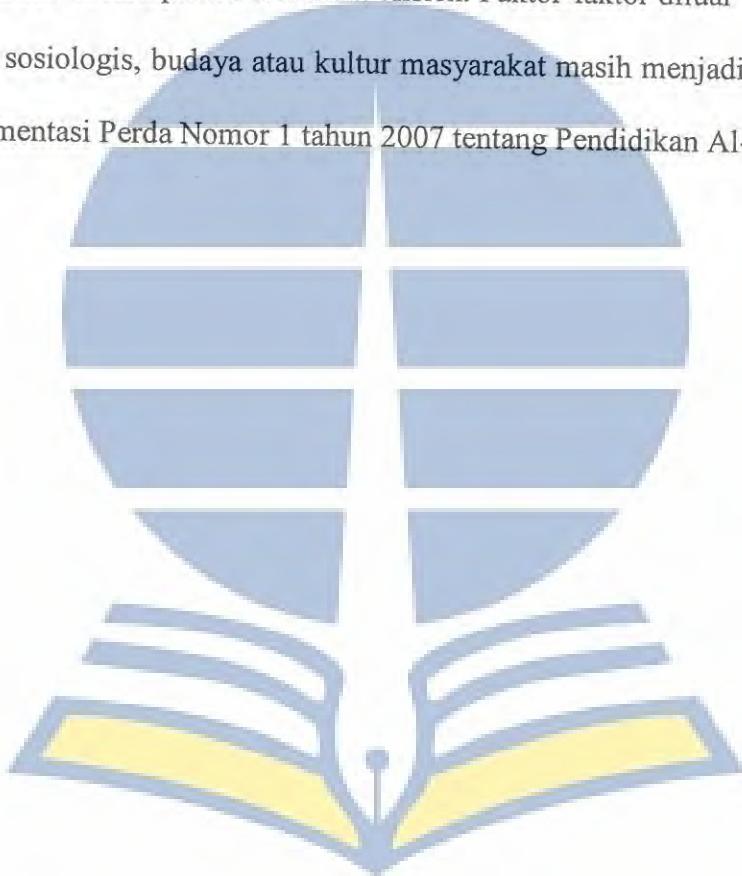
Dari fakta yang terungkap pada wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar (Drs. Mustakim KR, M.Mpd), bahwa sejak tahun 2009 pengelolaan pendidikan Al-Qur'an diambil alih Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Padahal Pendidikan Al-Qur'an seharusnya berada dibawah kendali Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini dikarenakan ada kepentingan tertentu sehingga pada pengajuan anggaran pelaksanaan dan pengelolaan BTQ di sekolah mendapat tanggapan beragam dan akhirnya bagian Kesra yang berhasil menganggarkan kegiatan ini dengan mengacu pada pelaksanaan pembangunan dan kegiatan keagamaan di pemerintah daerah.

4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting terhadap pelaksanaan kebijakan dapat dimungkinkan dihambat oleh struktur birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit-belit, serta prosedural yang tidak efisien. Implementasi kebijakan publik banyak ditentukan oleh aparat pelaksana dalam birokrasi dan prosedur implementasi atau karakteristik para pejabat birokrasi. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik sesungguhnya juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar birokrasi, seperti faktor sosiologis, budaya atau kultur masyarakat.

Sejak diberlakukannya implementasi Perda Nomor 1 tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Qur'an, hingga kini belumlah ada review terhadap perda tersebut dan juga bahwa sejak tahun 2009 pengelolaan pendidikan Al-Qur'an diambil alih Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Terlihat bahwa Struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan Perda Nomor 1 tahun 2007 secara prosedural tidak efisien. Faktor-faktor diluar birokrasi, seperti faktor sosiologis, budaya atau kultur masyarakat masih menjadi hambatan dalam implementasi Perda Nomor 1 tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Qur'an.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap temuan peneliti dilapangan tentang Implementasi Perda No.1 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dapat disimpulkan bahwa:

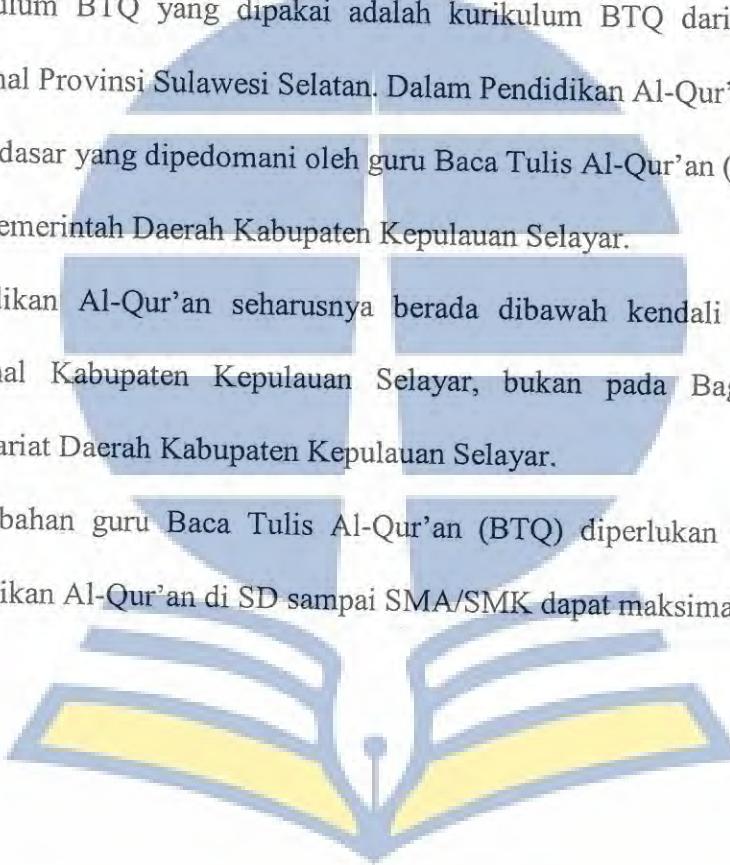
1. Implementasi Perda No.1 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Qur'an Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar ditandai dengan pengangkatan guru Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) yang ditempatkan pada beberapa Sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar mulai dari SD sampai SMA/SMK. Perekrutan guru BTQ sejak tahun 2007 untuk ditempatkan di sekolah-sekolah. Dalam Pendidikan Al-Qur'an harus ada acuan dasar yang dipedomani oleh guru Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ), akan tetapi kurikulum BTQ yang dipakai adalah kurikulum BTQ dari Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Sejak tahun 2009 pengelolaan pendidikan Al-Qur'an diambil alih Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Padahal Pendidikan Al-Qur'an seharusnya berada dibawah kendali Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Jumlah guru Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) adalah sebanyak 95 orang dan disebar ke beberapa SD, SMP, dan SMA/SMK. Akan tetapi sejak tahun 2009 pengelolaan pendidikan Al-Qur'an diambil alih Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar. Maka penambahan Jumlah guru Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) menjadi tidak jelas.

4. Sejak diberlakukannya Implementasi Perda Nomor 1 tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Qur'an, hingga kini belumlah ada review terhadap perda tersebut.

B. Saran

1. Kurikulum BTQ yang dipakai adalah kurikulum BTQ dari Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam Pendidikan Al-Qur'an seharusnya ada acuan dasar yang dipedomani oleh guru Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pendidikan Al-Qur'an seharusnya berada dibawah kendali Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar, bukan pada Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Penambahan guru Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) diperlukan agar pelaksanaan Pendidikan Al-Qur'an di SD sampai SMA/SMK dapat maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin , 2012, Analisis Kebijaksan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- , 2001. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Agustino, Leo, 2012, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Cet. III, Bandung, Alfabetika.
- Ali, Faried, dkk, 2012, Studi Analisa Kebijakan (Konsep, Teori, Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan, Bandung, Cet. I, Refika Aditama.
- Anselm Strauss & Juliet Corbin. 2010. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : PustakaPelajar
- Arief, Armai. *Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta; Intermasa 2002.
- Arwani, M. Ulinnuha. *Thoriqoh Baca Tulis dan Menghafalkan al-Qur'an (Yanbu'a)*. Kudus; Pondok Tahfidz yanbu'ul Qur'an. 2004.
- Azwar, S. 2000. Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dun, Willian N., 2013, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Cet. V, Gadjah Madah University Press.
- Emzir. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Rajawali
- Fadillah 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Surabaya: Pustaka Pelajar dan Universitas Sunan Giri.
- Hamalik, Oemar. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung; Remaja Rosdakarya. 2007.
- Hamalik, Oemar. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung; Remaja Rosdakarya. 2008.
- Hasibuan, Malayu. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia:Pengertian, Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta.
- Huda, Miftahul, 2011, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, Surabaya, Pustaka Pelajar
- Islamy, Irfan, 2009, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Cet. XV, Bumi Aksara.
- Kismartini, dkk, 2011. Analisis Kebijakan Publik, Universitas Terbuka, Jakarta.

- Majid, Abdul. *Perencanaan Pembelajaran, Mengembangkan Standar Kompetensi*
- Moekijat, 1995, Analisis Kebijaksanaan Publik, Bandung, Mandar Maju.
- Nasution, S., 2009, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Cet. XI, PT.Bumi Aksara, Jakarta.
- Ridwan, 2010, Metode dan Teknik Penyusunan Tesis, Cet.VIII, Alfabeta, Bandung.
- Rusman, 2013, Model-Model Pembelajaran (Mengembangkan Profesionalisme Guru), Rajawali Pers.
- Solthan, Azikin, 2011. Format Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan APBD Pasca Pilkada Langsung, Ombak, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RD), Cet. VIII, CV. Alfabeta, Bandung.
- Taniredja, Tukin, 2014, Model-Model Pembelajaran, Motivasi dan Efektif, Cet. V, Alfabeta, Bandung,
- Van Meter dan Van Horn, 1976. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, Amsterdam: Van Meter and Van Horn Administration & Society
- Wahab. 2001. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa. 2002. Manajemen Kinerja. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Winarno, Budi, 2012, Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus), Yogyakarta, Cet. II, CAPS.
- Zuriah, Nurul, 2009, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori-Aplikasi), Cet. III, PT.Bumi Aksara, Jakarta.

Tesis / Skripsi

Baharuddin, Muhammad Rafie, Analisis Implementasi Peraturan Bupati Luwu Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Luwu, 2012.

Masyrifah, Dewi (2009). Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an Di SMP Negeri 2 Purwodadi Pasuruan.

Peraturan Perundang-undangan

Departemen Pendidikan Nasional, 2003, UU. RI. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. *Panduan Penyusunan KTSP Lengkap (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) SD, SMP dan SMA*. Jakarta; Pustaka Yustisia. 2007.

Peraturan Daerah Kabupaten Selayar No.1 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Al-Qur'an, 2007.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional. Jakarta; BP. Cipta Jaya. 2003.

Makalah-makalah :

Implementasi Kebijakan Publik, about these Ads.

Leistyodono, Makalah : Pengaruh Impelementasi Kebijakan Anggaran Terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar (Studi Tentang Persepsi Impelementasi Kebijakan Anggaran Pendidikan Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas di Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Bogor

Siahaan, Daniel Adam dkk, Implementasi Kebijakan Bus Rapid Trans Semarang di Kota Semarang, www.Semarang.go.id.

**DAFTAR PERTANYAAN DALAM RANGKA PENELITIAN TENTANG
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
PENDIDIKAN AL-QUR'AN PADA SEKOLAH DASAR
DI KECAMATAN BENTENG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**Daftar pertanyaan : Dinas Pendidikan Nasional dan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah
Kepulauan Selayar**

Petunjuk :

- I. Pertanyaan ini adalah bagian dalam pengumpulan data dalam rangka pelaksanaan penelitian ini
- II. Pertanyaan ini dijawab sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa merasa terpaksa dan tidak ada tekanan dari siapapun.
- III. Daftar Pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 di Kabupaten Kepulauan Selayar?

Salah bentuk pelaksanaan perda nomor 1 tahun 2007 adalah pelaksanaan pelajaran baca tulis al-qur'an pada sekolah dasar, sebagaimana dulu menengah atas.

2. Apakah Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2007?

Pemerintah menyiapkan dana setiap tahunnya untuk membiayai pelaksanaan perda ini baik dalam bentuk honor guru BTR dan biaya pelaksanaan ujian/munajat sel.

3. Apa dasar hukumnya sehingga pengelolaan Pendidikan al-Qur'an di sekolah dilaksanakan oleh Bidang Kesejahteraan rakyat?

Peraturan daerah nomor 1 tahun 2007 dan peraturan bupati sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan pendidikan al-Qur'an.

4. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007?

Faktor yang mempengaruhi adalah :

1. struktur birokrasi
2. pelaksana

5. Usaha apa yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2007?

menyiapkan anggaran untuk melaksanakan pelaksanaan pendidikan al-Qur'an.

6. Bagaimana sikap pemerintah dalam mengimplementasikan pendidikan al-Qur'an di Sekolah

Pemerintah berupaya untuk melaksanakan perda nomor 1 tahun 2007 dengan mengangkat Guru-Guru BQ dan ditempat pada Sekolah Dasar.

7. Apakah implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2007 sudah dilaksanakan secara maksimal di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Belum, Perda itu ruang lingkupnya meliputi seluruh masyarakat yang beragama Islam namun yang ada sekarang baru anak-anak sekolah.

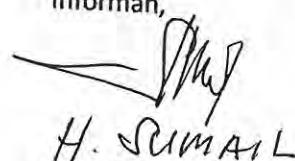
8. Apakah pengelolaan pendidikan al-Qur'an sudah sesuai dengan struktur birokrasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar?

Tidak, Lemestinya yang mengelola selara langsung adalah Dinas Pendidikan.

Benteng,

Februari 2017

Informan,



H. SUMAIL

**DAFTAR PERTANYAAN DALAM RANGKA PENELITIAN TENTANG
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
PENDIDIKAN AL-QUR'AN PADA SEKOLAH DASAR
DI KECAMATAN BENTENG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Daftar pertanyaan : Dinas Pendidikan Nasional dan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar

Petunjuk :

- I. Pertanyaan ini adalah bagian dalam pengumpulan data dalam rangka pelaksanaan penelitian ini
- II. Pertanyaan ini dijawab sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa merasa terpaksa dan tidak ada tekanan dari siapapun.
- III. Daftar Pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 di Kabupaten kepulauan Selayar?

Perda Nomor 1 Tahun 2007 dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan Baen tulis Al-Qur'an (BTQ) pada Sekolah Dasar, SMP, SMA dan SMK dan memasukkannya sebagai Pelajaran Intra Kurikuler.

2. Apakah Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2007?

Pemerintah Daerah menyiapkan prasarana yang Baen tulis Al-Qur'an (BTQ) sebanyak 100 orang yang disebarkan ke sekolah dasar sampai Sekolah Lanjut Atas.

3. Apa dasar hukumnya sehingga pengelolaan Pendidikan al-Qur'an di sekolah dilaksanakan oleh Bidang Kesejahteraan rakyat?

Dasar Hukum yang digunakan dalam Pengelolaan Pendidikan Al-Qur'an melalui pelajaran Baen tulis Al-Qur'an adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 dan Peraturan Propinsi

4. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007?

Ade beberapa faktor yang mempengaruhi Perda Nomor 1 tahun 2007 yaitu : a. Pelaksana b. Struktur Birokrasi c. Disposisi/Pencitraan Kebijakan

5. Usaha apa yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2007?

Salah satu usaha pemerintah daerah adalah menyelenggarakan Binaan Binaan Intra kewilayahan di SD, SMP dan SMA/SMK.

6. Bagaimana sikap pemerintah dalam mengimplementasikan pendidikan al-Qur'an di Sekolah

Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk membantu pelaksanaan pendidikan Al-Qur'an. Faith mengimplen menganggaran setiap tahunnya.

7. Apakah implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2007 sudah dilaksanakan secara maksimal di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Belum, karena pengelolaan pendidikan Al-Qur'an ditangani langsung oleh Kesubag Keagamaan Bidang Kesa Edyngga Pelaksanaan dan evaluasinya tidak berjalan dengan baik.

8. Apakah pengelolaan pendidikan al-Qur'an sudah sesuai dengan struktur birokrasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar?

Tidak, sebenarnya yang dibentuk kewajiban dalam pengelolaannya adalah Dinas Pendidikan Wilayah dan Bekerjasama dengan Kementerian Agama.

Benteng, Februari, 2017

Informan,

Drs. Mochtarikin KA.

**DAFTAR PERTANYAAN DALAM RANGKA PENELITIAN TENTANG
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
PENDIDIKAN AL-QUR'AN PADA SEKOLAH DASAR
DI KECAMATAN BENTENG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Daftara pertanyaan : Guru Pendidikan Al-Qur'an (Baca Tulis Al-Qur'an)

Petunjuk :

- I. Pertanyaan ini adalah bagian dalam pengumpulan data dalam rangka pelaksanaan penelitian ini
- II. Pertanyaan ini dijawab sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa merasa terpaksa dan tidak ada tekanan dari siapapun.
- III. Daftar Pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan pelajaran pendidikan al-Qur'an di sekolah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2007?

Ya, Pendidikan Al-Qur'an yang diberlakukan dalam bentuk pelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) di sekolah masih sampai Sekolah Lanjutat Atas.

2. Siapakah yang mengangkat guru Pendidikan Al-Qur'an di Sekolah (guru BTQ)?

Pemerintah Daerah (Bupati Kepulauan Selayar)

3. Apakah pelajaran pendidikan Al-Qur'an masuk dalam pelajaran intra kurikuler ?

Ya, Pelajaran Baca tulis Al-Qur'an diajarkan di pagi hari namun hanya diberi waktu satu jam pelajaran.

4. Berapa jam pelajaran yang diberikan oleh Kepala Sekolah dalam menyajikan pelajaran pendidikan Al-Qur'an ?

Hanya satu jam pelajaran perkelas

5. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan al-Qur'an di sekolah?

*1. Tidak tersedianya Bahan pelajaran
2. Tidak adanya kesengaman bapak
3. Belum tersedianya kurikulum Baca tulis Al-Qur'an
4. Terbatasnya waktu yang disediakan dalam menyajikan pelajaran BTQ*

6. Apa bentuk evaluasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pelajaran pendidikan al-Qur'an?

*Setiap pelajaran dilaksanakan Munasabah untuk
Bahan Kelas VI SD*

7. Adakah pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan tugas guru pelajaran pendidikan al-Qur'an di sekolah?

Pengawasan selanjutnya langsung tidak ada.

8. Metode apa yang digunakan dalam mengajarkan pelajaran pendidikan al-Qur'an di Sekolah?

Ada beberapa metode yang digunakan di antaranya :
 a. Quantum learning
 b. Metode pola asul
 c. Problem Solving

Benteng, Februari 2017

Informan,

*Muhammad
Najamuddin*

**DAFTAR PERTANYAAN DALAM RANGKA PENELITIAN TENTANG
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
PENDIDIKAN AL-QUR'AN PADA SEKOLAH DASAR
DI KECAMATAN BENTENG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Daftara pertanyaan : Guru Pendidikan Al-Qur'an (Baca Tulis Al-Qur'an)

Petunjuk :

- I. Pertanyaan ini adalah bagian dalam pengumpulan data dalam rangka pelaksanaan penelitian ini
- II. Pertanyaan ini dijawab sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa merasa terpaksa dan tidak ada tekanan dari siapapun.
- III. Daftar Pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan pelajaran pendidikan al-Qur'an di sekolah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2007?

Ya, Pelajaran Baca Tulis Al-Qur'an sebagai bentuk implementasi pendidikan Al-Qur'an yang diaplikasikan mulai SD Sampai SLTA.

2. Siapakah yang mengangkat guru Pendidikan Al-Qur'an di Sekolah (guru BTQ)?

Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Kepulauan Selayar

3. Apakah pelajaran pendidikan Al-Qur'an masuk dalam pelajaran intra kurikuler?

Ya. Karena masuk dalam pembelajaran siswa dini hari.

4. Berapa jam pelajaran yang diberikan oleh Kepala Sekolah dalam menyajikan pelajaran pendidikan Al-Qur'an ?

Dua jam pelajaran yang disiapkan oleh kepala sekolah.

5. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan al-Qur'an di sekolah?

1. Resesi Bahan / Muryah.

2. Keterbatasan buku paket.

3. Kompetensi guru

4. Kurikulum yang tersedia

5. Pengawas

6. Apa bentuk evaluasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pelajaran pendidikan al-Qur'an?

Evaluasi yang dilaksanakan secara serentak untuk guru SD Kelas IV yang dinamakan munajatyah.

7. Adakah pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan tugas guru pelajaran pendidikan al-Qur'an di sekolah?

Tidak pengawasan langsung yang diberikan oleh pengelola (Bolang) tetapi pada lembar tugas Daerah Kepulauan Selatan.

8. Metode apa yang digunakan dalam mengajarkan pelajaran pendidikan al-Qur'an di Sekolah?

Metode yang digunakan ber variasi diantaranya

- a. Pembelajaran langsung / berfile asuh
- b. pembimbingan kepada siswa Yaitu Quantum Learning
- c. pendekatan penyelesaian masalah.

Benteng, Februari 2017

Informan,

Mustafa
MESTAFA

DAFTAR PERTANYAAN DALAM RANGKA PENELITIAN TENTANG
 ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
 PENDIDIKAN AL-QUR'AN PADA SEKOLAH DASAR
 DI KECAMATAN BENTENG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Daftara pertanyaan : Guru Pendidikan Al-Qur'an (Baca Tulis Al-Qur'an)

Petunjuk :

- I. Pertanyaan ini adalah bagian dalam pengumpulan data dalam rangka pelaksanaan penelitian ini
- II. Pertanyaan ini dijawab sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa merasa terpaksa dan tidak ada tekanan dari siapapun.
- III. Daftar Pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan pelajaran pendidikan al-Qur'an di sekolah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2007?

Ya, pelajaran baca tulis Al-Qur'an yang diterapkan di sekolah merupakan bagian dari pelaksanaan pendidikan Al-Qur'an.

2. Siapakah yang mengangkat guru Pendidikan Al-Qur'an di Sekolah (guru BTQ)?

Yang mengangkat Guru BTQ adalah pemerintah Daerah melalui Bidang Kesejahteraan Rakyat.

3. Apakah pelajaran pendidikan Al-Qur'an masuk dalam pelajaran intra kurikuler?

Ya, pendidikan Al-Qur'an dimasukkan sebagai Pelajaran Intra Kurikuler.

4. Berapa jam pelajaran yang diberikan oleh Kepala Sekolah dalam menyajikan pelajaran pendidikan Al-Qur'an?

Bi sekolah kami dibentuk ada lima Pelajaran pendidikan per minggu.

5. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan al-Qur'an di sekolah?

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi yakni :

a. Keterlibatan BTQ

b. Buku Paket

c. Kompetensi Guru

d. Sosial dan Situasi yang terjadi

6. Apa bentuk evaluasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pelajaran pendidikan al-Qur'an?

Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk Munaqashah Brig. Hasan & D.

7. Adakah pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan tugas guru pelajaran pendidikan al-Qur'an di sekolah?

Tidak ada pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pelajaran baca tulis Al-Qur'an.

8. Model pembelajaran apa yang digunakan dalam mengajarkan pelajaran pendidikan al-Qur'an di Sekolah?

Bahan memperbaiki materi pelajaran ada beberapa metode / pendekatan yg dilaksanakan yakni :

- a. Pendekatan Quantum Learning.
- b. pendekatan Problem Solving
- c. pendekatan pola asuh

Benteng, 7 februari 2017

Informan,

ABDULLAH.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PENDIDIKAN DASAR**

LEMBAR LAYAK UJI

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya selaku Pembimbing TAPM dari Mahasiswa:

Nama/NIM : Masna Dewi/500626963

Judul TAPM : Perbedaan Peningkatan Hasil Belajar IPA dan Keterampilan Proses Sains Melalui Model Pembelajaran *Discovery* dan Inkuiri Terbimbing Pada Siswa Kelas V SDN Padangsidimpuan Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah/baru *) selesai sekitar 80% sehingga dinyatakan sudah layak uji/belum layak uji dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Pembimbing II,

Medan, Februari 2018
Pembimbing I,

Isti Rokhiyah, M.A., Ph.D.
NIP. 196207161988012001

Dr. Kms. M. Amin Fauzi, M.Pd.
NIP. 196406291993031001